

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX (I-HDI)*, PENYALURAN ZAKAT DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH TAHUN 2020–2024 (Studi Pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)



Disusun Oleh:

**FAUZAN AZIMA
NIM. 220602070**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (I-HDI), PENYALURAN ZAKAT DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH TAHUN 2020–2024 (Studi Pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)



Disusun Oleh:

**FAUZAN AZIMA
NIM. 220602070**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fauzan Azima
NIM : 220602070
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2026
Yang Menyatakan,



Fauzan Azima

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**PENGARUH *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (I-HDI), PENYALURAN
ZAKAT DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH TAHUN 2020–2024
(Studi Pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)**

Disusun Oleh:

Fauzan Azima

NIM : 220602070

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi
syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Dr. Evrivenni, S.E., M.Si., CTT., CATr., CCSM

NIP. 198304132023212025

Pembimbing II,

Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E.

NIP. 199507072025051002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si

NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Islamic Human Development Index (I-HDI), Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024
(Studi pada 23 Kabupaten Kota Provinsi Aceh)

Fauzan Azima
NIM: 220602070

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 20 Agustus 2026 M
7 Rabiul Awal 1448 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Evriyenni, S.E., M.Si
NIP. 198304132023212025


Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E
NIP. 199507072025051002

Penguji I

Penguji II


Mursalinna, M.E
NIP. 199211172020121011


Husnul Mirzal, S.H., M.SEI
NIP. 199606032025051006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Prof. Dr. Haniy Fudhri, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT.

PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussala Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fauzan Azima
NIM : 220602070
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 220602070@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi

Yang berjudul:

Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024 (Studi pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Agustus 2026

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Fauzan Azima
NIM.220602070

Dr. Evrivenni S.E., M.Si
NIP. 198304132023212025

Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E
NIP. 199507072025051002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian “Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024”.

Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Skripsi ini disusun dengan maksud guna memenuhi persyaratan untuk gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Muksal, S.E.I., M.E.I., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., ME., selaku Ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr., CCSM., selaku Pembimbing I dan Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan ilmu pengetahuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr., CCSM., selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) terima kasih atas bimbingannya selama ini, serta seluruh Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Azhari, S.Pd. dan Cut Nurhafni, S.Pd.I., atas doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan moril dan materiil yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah, dan juga kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat selama ini.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Ekonomi Syariah 22 dan Agen Pojok Statistik atas segala dukungan, motivasi, ilmu, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Kebersamaan,

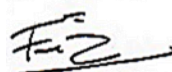
semangat, dan inspirasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat suka duka selama perkuliahan yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam setiap proses perjuangan penulis, Rauf Al-Rizki, Ardiansyah, Siti Radha Novianti, Cut Amanda Syifa Zhafira, Ahmad Rochied, dan Afzalaul Fatha. Terima kasih kepada semuanya karena telah menjadi bagian dari kisah penulis, yang akan selalu penulis kenang dengan penuh kehangatan.
9. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerja sama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat konstruktif demi kelancaran skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Syariah pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian dalam penulisan skripsi.

Banda Aceh, 17 Agustus 2026

Penulis,



Fauzan Azima

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
اَوْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

<i>qāla</i>	:	قَالَ
<i>ramā</i>	:	رَمَى
<i>qīla</i>	:	قِيلَ
<i>yaqūlu</i>	:	يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfāl:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madinatul Munawwarah

Ṭalḥah:

طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Fauzan Azima
NIM : 220602070
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh (Studi Pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)
Pembimbing I : Dr. Evriyenni, S.E., M.Si., CTT., CATr., CCSM
Pembimbing II : Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan di Provinsi Aceh yang masih berada pada tingkat relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatra. Kondisi tersebut membawa implikasi pada keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, serta keluar dari lingkaran ketertinggalan sosial ekonomi yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Baitul Mal dan BAZNAS. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial I-HDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, penyaluran zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan TPT berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Secara simultan, I-HDI, penyaluran zakat, dan TPT berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: *Islamic*, HDI, Zakat, Pengangguran, Kemiskinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Sistematika Penelitian	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Kemiskinan.....	20
2.1.1 Definisi Kemiskinan.....	20
2.1.2 Kemiskinan Menurut Perspektif Islam.....	22
2.1.3 Jenis-Jenis Kemiskinan	23
2.1.4 Pengukuran Kemiskinan	26
2.1.5 Penyebab Terjadinya Kemiskinan.....	28
2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	30
2.2.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	30
2.2.2 <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI).....	31
2.2.3 Indikator Penyusun <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI).....	35
2.3 Penyaluran Zakat.....	44
2.3.1 Definisi Zakat	44
2.3.2 Landasan Hukum Zakat.....	46

2.3.3 Jenis-Jenis Zakat	47
2.3.4 Syarat dan Ketentuan Zakat	48
2.3.5 Penyaluran Zakat	49
2.3.6 Golongan (asnaf) Penerima Zakat	50
2.3.7 Metode Penyaluran Zakat	50
2.3.8 Bentuk Penyaluran Zakat	51
2.4 Pengangguran	51
2.4.1 Definisi Pengangguran	52
2.4.2 Pengangguran Berdasarkan Cirinya	54
2.4.3 Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya	56
2.4.4 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	58
2.5 Penelitian Terdahulu	58
2.6 Kerangka Pemikiran	73
2.6.1 Pengaruh <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI) terhadap Tingkat Kemiskinan	74
2.6.2 Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan	75
2.6.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan	77
2.7 Pengembangan Hipotesis	79
BAB III METODE PENELITIAN	81
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian	81
3.2 Jenis dan Sumber Data	81
3.3 Populasi	82
3.4 Variabel Penelitian	82
3.5 Klasifikasi Variabel	82
3.5.1 Definisi Operasional Variabel	83
3.6 Metode Analisis Data	96
3.6.1 Statistik Deskriptif	98
3.6.2 Estimasi Model Regresi Data Panel	98
3.6.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	101
3.6.4 Uji Asumsi Klasik	102
3.6.5 Uji Hipotesis	105
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	107
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian	107
4.2 Statistik Deskriptif Data Penelitian	109
4.2.1 Tingkat Kemiskinan (Y)	110

4.2.2	<i>Islamic Human Development Index (I-HDI) (X1)</i>	112
4.2.3	Penyaluran Zakat (X2)	114
4.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X3)	116
4.3	Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel	118
4.3.1	Uji Chow	120
4.3.1	Uji Hausman	121
4.4	Estimasi Regresi Data Panel	122
4.5	Uji Asumsi Klasik	123
4.5.1	Uji Multikolinearitas	124
4.5.2	Uji Normalitas	124
4.5.3	Uji Autokorelasi	125
4.5.4	Uji Heteroskedastisitas	126
4.6	Uji Hipotesis	127
4.6.1	Uji Parsial (Uji - t)	127
4.6.2	Uji Simultan (Uji - f)	128
4.6.3	Uji Koefisien Determinasi (R²)	129
4.7	Analisis Regresi Data panel	129
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian	131
4.8.1	Pengaruh <i>Islamic Human Development Index (I-HDI)</i> terhadap Tingkat Kemiskinan	131
4.8.2	Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan	133
4.8.3	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan	135
4.8.4	Pengaruh <i>Islamic Human Development Index (I-HDI)</i> , Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan	138
BAB V PENUTUP		139
5.1	Kesimpulan	139
5.2	Saran	140
5.3	Keterbatasan Penelitian	140
DAFTAR PUSTAKA		142
LAMPIRAN		153

DAFTAR TABEL

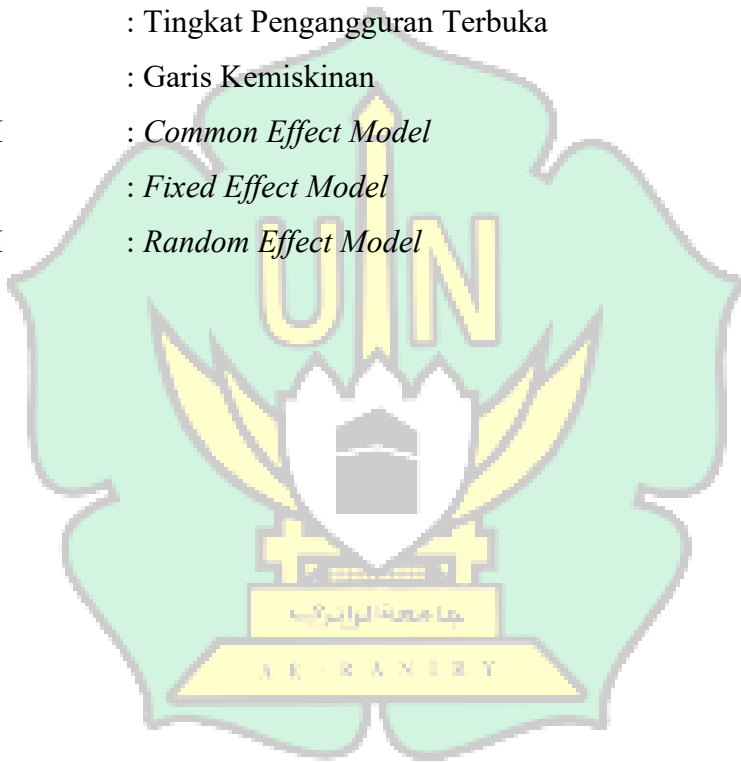
Tabel 2.1	Indeks Dimensi I-HDI.....	35
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	65
Tabel 3.1	Indikator I-HDI yang digunakan	85
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel	93
Tabel 4.1	Ibu Kota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	108
Tabel 4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	109
Tabel 4.3	Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024	110
Tabel 4.4	Data <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI) Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024	113
Tabel 4.5	Data Penyaluran Zakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024	115
Tabel 4.6	Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2020-2024	117
Tabel 4.7	Hipotesis Uji <i>Chow</i> , Uji <i>Hausman</i> , dan Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	119
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Chow</i>	120
Tabel 4.9	Hasil Uji Hausman	121
Tabel 4.10	Hasil Estimasi Regresi Data Panel (<i>Fixed Effects Model</i>)	122
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinearitas (<i>Pearson Correlation Matrix</i>).....	124
Tabel 4.12	Hasil Uji Autokorelasi (<i>Durbin-Watson</i>)	125
Tabel 4.13	Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Absolute Residual</i>)	126
Tabel 4.14	Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji – t)	127
Tabel 4.15	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-f.....	128
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Kemiskinan (P0) Indonesia Tahun 2020–2024.....	3
Gambar 1.2	Persentase Kemiskinan (P0) Provinsi Aceh dan Kemiskinan Nasional Tahun 2020–2024.....	4
Gambar 1.3	Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024	6
Gambar 1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Tahun 2020-2024.....	8
Gambar 1.5	Jumlah Penyaluran Zakat Provinsi Aceh Tahun 2020 – 2024	12
Gambar 1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Aceh Tahun 2020–2024.....	14
Gambar 2.1	Indikator Potensial untuk Indeks ad-Dien.....	37
Gambar 2.2	Indikator Potensial untuk Indeks an-Nafs.....	38
Gambar 2.3	Indikator Potensial untuk Indeks al-‘Aql.....	40
Gambar 2.4	Indikator Potensial untuk Indeks an-Nasl.....	41
Gambar 2.5	Indikator Potensial untuk Indeks al-Mal.....	43
Gambar 2.6	Skema Kerangka Pemikiran.....	79
Gambar 4.1	Peta Provinsi Aceh.....	107
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas	125

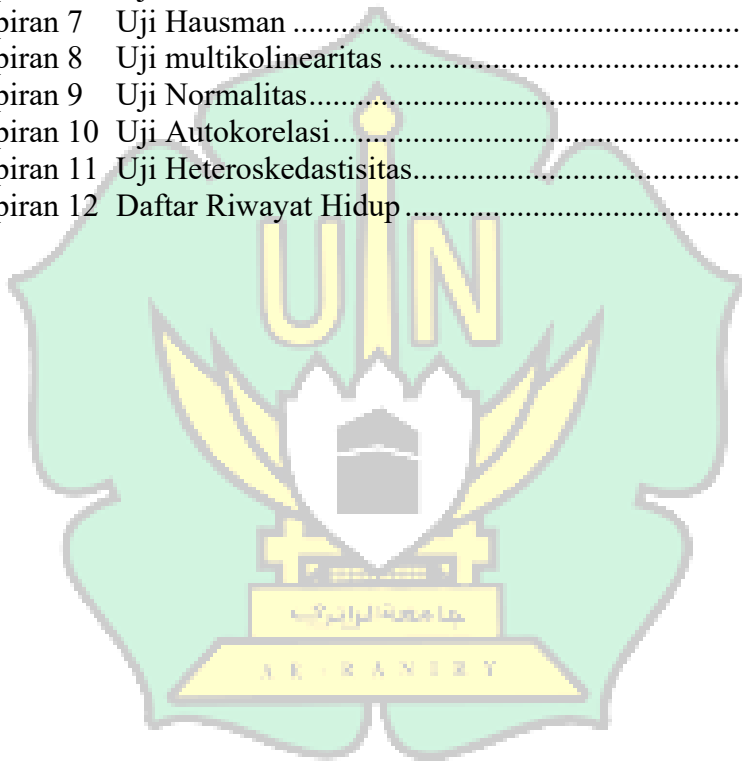
DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
I-HDI	: <i>Islamic Human Development Index</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
GK	: Garis Kemiskinan
CEM	: <i>Common Effect Model</i>
FEM	: <i>Fixed Effect Model</i>
REM	: <i>Random Effect Model</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Panel.....	153
Lampiran 2	Statistik Deskriptif.....	157
Lampiran 3	<i>Common Effect Model</i>	158
Lampiran 4	<i>Random Effect Model</i>	159
Lampiran 5	<i>Random Effect Model</i>	160
Lampiran 6	Uji Chow.....	161
Lampiran 7	Uji Hausman.....	162
Lampiran 8	Uji multikolinearitas.....	164
Lampiran 9	Uji Normalitas.....	165
Lampiran 10	Uji Autokorelasi.....	166
Lampiran 11	Uji Heteroskedastisitas.....	167
Lampiran 12	Daftar Riwayat Hidup.....	168



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

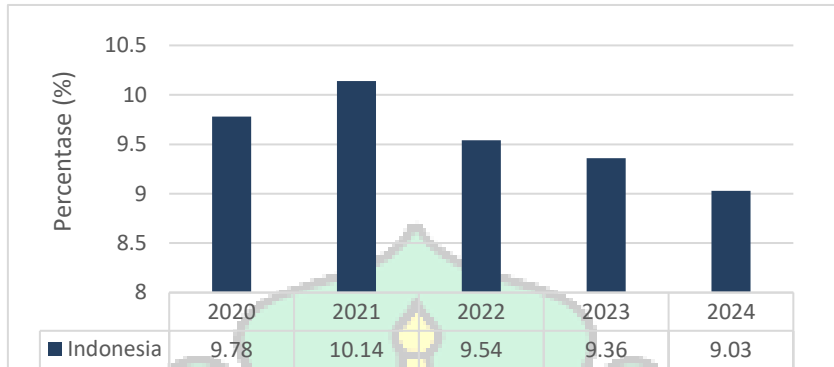
Agenda menghapus kemiskinan dalam segala bentuk dan di seluruh dunia telah menjadi tujuan utama pembangunan global yang tertuang dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana *no poverty* (tanpa kemiskinan) ditempatkan sebagai tujuan pertama. Penghapusan kemiskinan dipandang sebagai prasyarat utama bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perlu dijadikan sebagai fokus utama dalam pembangunan. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan target SDGs, khususnya terkait pengentasan kemiskinan. Komitmen ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, di mana strategi pengurangan kemiskinan menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional (Aryani, 2024).

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang tidak mampu dalam memenuhi standar hidup minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak (*World Bank*, 2020). Kondisi serba kekurangan ini terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan akibat keterbatasan kepemilikan faktor produksi, keterampilan, produktivitas, serta kesempatan untuk berpartisipasi dan menerima

manfaat dari proses pembangunan (Subandi, 2016; Fitriani, 2024). Dalam pandangan Ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya berfokus pada dimensi materi semata, melainkan juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan sosial (Agus, 2024). Islam secara spesifik membagi kemiskinan ke dalam dua kategori yaitu fakir, ketidakpunyaan akibat *uzur syar'i* seperti usia tua atau kesibukan dakwah dan miskin, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar hidup meskipun telah memiliki pekerjaan dan penghasilan (Maulana *et al.*, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. BPS menetapkan standar Garis Kemiskinan (GK), yaitu nilai minimum pengeluaran per kapita per bulan agar dapat hidup secara layak. Pada tahun 2024, garis kemiskinan nasional ditetapkan sebesar Rp595.242,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809,00 (25,50 persen). Penduduk dengan rata-rata pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS, 2024).

Gambar 1.1
Persentase Kemiskinan (P0) Indonesia Tahun 2020–2024



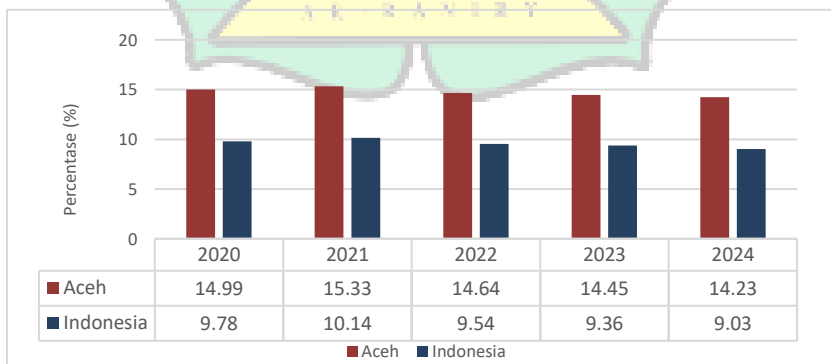
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan gambar 1.1, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 9,78 persen, kemudian meningkat menjadi 10,14 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Namun, pada tahun-tahun berikutnya angka kemiskinan kembali mengalami penurunan, yaitu menjadi 9,54 persen pada tahun 2022, 9,36 persen pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 9,03 persen pada tahun 2024. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kemiskinan nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga menjadi tantangan serius pada tingkat daerah. Salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan adalah Aceh.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung barat pulau Sumatera dan terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, Aceh masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan sulit diatasi karena masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses berbagai aset esensial (*essential assets*), yang meliputi *human capital*, *physical capital*, *natural capital*, *financial capital*, dan *social capital*. Keterbatasan tersebut diperparah oleh berbagai faktor yang menjadi penyebab sekaligus penghambat upaya pengentasan kemiskinan, seperti tingginya tingkat pengangguran, adanya setengah pengangguran (*underemployment*), serta rendahnya tingkat upah (Sitorus & Utami, 2023). Selama periode 2020-2024. Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi cenderung menurun namun tetap berada di atas angka rata-rata nasional.

Gambar 1.2
Persentase Kemiskinan (P0) Provinsi Aceh dan Kemiskinan Nasional Tahun 2020–2024



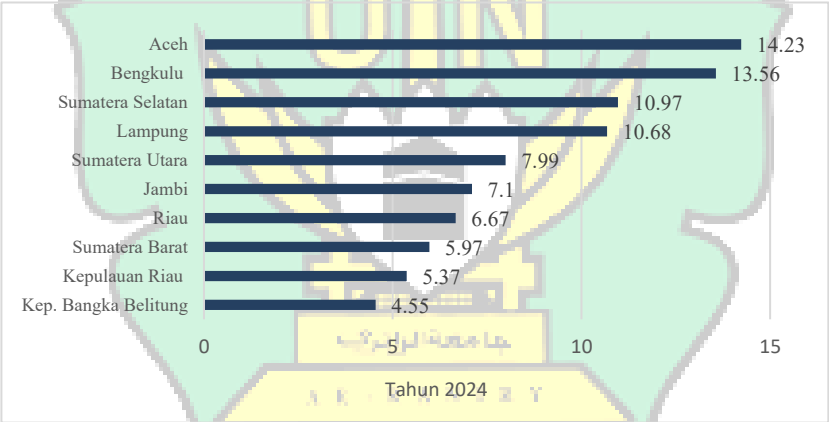
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan gambar 1.2, persentase penduduk miskin Aceh menunjukkan tren yang cenderung menurun selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 14,99 persen. Persentase kemiskinan sempat berada pada angka 15,33 persen pada tahun 2021 akibat tekanan sosial ekonomi selama pandemi Covid-19. Pada tahun-tahun berikutnya, tingkat kemiskinan mulai mengalami penurunan menjadi 14,64 persen pada tahun 2022, 14,45 persen pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 14,23 persen pada tahun 2024. Namun demikian, kemiskinan nasional telah berhasil ditekan hingga di bawah angka 10 persen, sementara tingkat kemiskinan di Aceh masih berada pada angka 14,23 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh belum berjalan secara optimal.

Meskipun berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, proses pemulihan ekonomi pasca konflik Aceh yang berkepanjangan dan bencana alam tsunami tahun 2004 masih menyisakan tingkat kemiskinan yang resisten tinggi dibanding provinsi lainnya di Pulau Sumatera (Sitorus & Utami, 2023). Berdasarkan gambar 1.3, pada tahun 2024 persentase kemiskinan di Aceh tercatat sebesar 14,23 persen, sehingga menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Angka tersebut melampaui Bengkulu yang berada di angka 13,56 persen dan Sumatera Selatan sebesar

10,97 persen. Sementara itu, sebagian besar provinsi lainnya di Sumatera telah mencapai tingkat kemiskinan di bawah 10 persen, bahkan beberapa di antaranya telah berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Aceh tertinggal dalam hal penurunan tingkat kemiskinan sehingga sebagian masyarakat Aceh masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi yang layak.

Gambar 1.3
Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Tingginya tingkat kemiskinan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap pembangunan daerah. Salah satu dampak paling nyata dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas kesehatan masyarakat akibat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Keterbatasan ekonomi juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan sehingga menurunkan kualitas

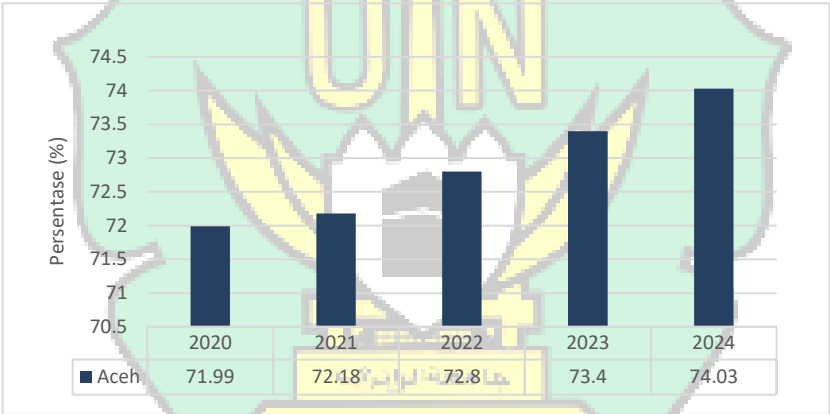
sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sulit meningkatkan produktivitas dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Akibatnya, generasi mendatang terjebak dalam siklus kemiskinan yang sama dan sulit diputus dari generasi ke generasi berikutnya dan berpotensi melahirkan generasi yang tertinggal dalam pembangunan (Maulana et al., 2022). Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Kualitas pembangunan manusia umumnya direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Menurut UNDP (2020) ketiga dimensi tersebut merupakan faktor penting yang menentukan kemampuan individu dalam meningkatkan produktivitas dan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang dikembangkan secara global, Badan Pusat Statistik merumuskan IPM berdasarkan tiga dimensi dasar. Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, dimensi pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (BPS, 2021).

Pencapaian nilai IPM yang rendah mencerminkan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, yang berdampak pada rendahnya produktivitas kerja dan pada akhirnya menurunkan

tingkat pendapatan masyarakat, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin (Arifin & Hendriyani, 2022). Menurut Karlsson dalam Viollani *et al.* (2022) peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengurangan kemiskinan.

Gambar 1.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Aceh (2024)

Berdasarkan gambar 1.4, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM Aceh tercatat sebesar 71,99, kemudian meningkat menjadi 72,18 pada tahun 2021. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2022 menjadi 72,80, dan kembali naik menjadi 73,40 pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, IPM Aceh

mencapai 74,03, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. IPM meningkat sebesar 2,04 poin dari tahun 2020-2024. Peningkatan kualitas manusia tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan secara masif, mengingat angka kemiskinan Aceh hanya berkurang sebesar 0,75% selama lima tahun terakhir dan tetap menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus berada jauh di atas rata-rata capaian penurunan kemiskinan nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikemukakan oleh UNDP merupakan salah satu alat ukur berbasis peringkat yang diakui oleh dunia. Namun, indikator yang digunakan dinilai belum mampu mengukur capaian pembangunan manusia di negara-negara Muslim secara komprehensif karena hanya menekankan aspek material dan fisik. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pembangunan manusia tidak hanya bersifat materi, tapi juga spiritual dan moral yang menempati kedudukan penting dalam hal pembangunan, karena sejatinya pembangunan dalam Islam bertujuan menciptakan manusia yang religius dan sejahtera serta berorientasi pada kebahagiaan di dunia dan akhirat (Jaya, 2022). Oleh karena itu, *Islamic Human Development Index* (I-HDI) hadir sebagai alternatif pengukuran pencapaian tingkat pembangunan manusia yang didasari oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam kerangka maqashid syariah.

Dalam konteks daerah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Aceh, pengukuran pembangunan manusia lebih tepat apabila

menggunakan *Islamic Human Development Index* (I-HDI), yang mengukur kesejahteraan manusia dalam perspektif islam dengan fondasi lima kebutuhan dasar dalam kerangka maqashid syariah (Hasbi *et al.*, 2023). I-HDI dirumuskan sebagai indeks gabungan beberapa indikator yang mengukur kualitas sumber daya manusia dari lima kebutuhan dasar dalam kerangka maqashid syariah yang mencakup lima dimensi utama yaitu, dimensi agama (*ad-dien*), dimensi jiwa (*an-nafs*), dimensi intelektual (*a-'aql*), dimensi keturunan (*an-nasl*), dan dimensi kekayaan (*al-mal*) (Anggraini, 2024). Menurut Asy-Syatibi, kelima dimensi maqashid syariah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara seimbang agar kesejahteraan hidup manusia dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, apabila salah satu dimensi tersebut tidak terpenuhi, maka kesejahteraan hidup manusia tidak dapat terwujud secara sempurna (Rafsanjani, 2018).

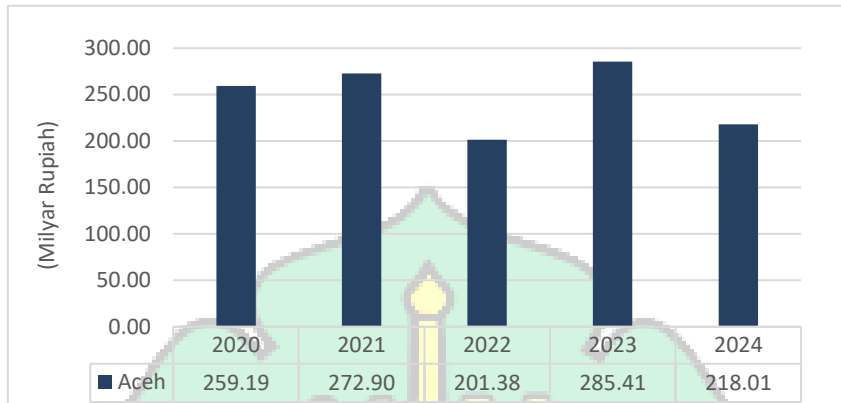
Selain melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia, upaya pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat. Menurut Yusuf Al-Qardhawi (dalam Murobbi & Usman, 2021) zakat merupakan *maaliyah ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi. Secara konseptual, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dari kelompok mampu (*muzakki*) kepada kelompok yang membutuhkan (*mustahik*), sehingga berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan juga telah diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang

No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan (Puskas BAZNAS, 2024).

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Menurut Abu Ubaid Al-Qasim dalam Suradi & Bustami (2022) zakat sangat berperan dalam mengonstruksi keadilan sosial. Instrument zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Penyaluran zakat oleh muzakki kepada mustahik baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mendesak seperti pangan, sandang, dan kesehatan bagi kelompok mustahik. Selain itu, zakat juga dapat dikelola secara produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif. (Aziz et al., 2020; Wasalmi, 2024).

Sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui Qanun Aceh, pengelolaan zakat Provinsi Aceh memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan sosial-ekonomi yang diatur secara resmi oleh negara melalui lembaga Baitul Mal. Optimalisasi pengelolaan zakat menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh.

Gambar 1.5
Jumlah Penyaluran Zakat Provinsi Aceh Tahun 2020 – 2024



Sumber: Puskas BAZNAS (2024)

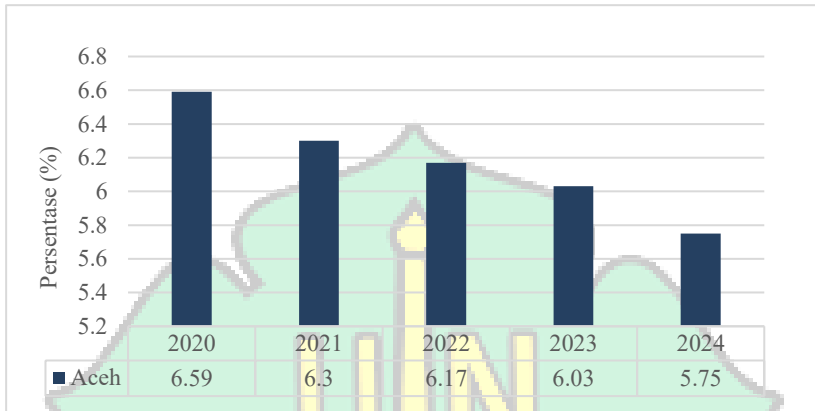
Berdasarkan gambar 1.5, Penyaluran dana zakat, di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 penyaluran zakat tercatat sebesar 259,19 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 272,90 miliar rupiah pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 jumlah penyaluran mengalami penurunan menjadi 201,38 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, yaitu 2023, penyaluran zakat kembali meningkat hingga mencapai 285,41 miliar rupiah, sebelum kembali menurun menjadi 218,01 miliar rupiah pada tahun 2024.

Indikator selanjutnya yang menempati posisi krusial dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Menurut Prawoto (2019) pengangguran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat karena kurangnya kesempatan kerja bagi mereka yang mencari penghasilan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tidak bekerja mengakibatkan turunnya taraf hidup seseorang karena tidak adanya pendapatan yang diperoleh. Bahkan, dalam kondisi bekerja, seseorang tersebut masih memiliki kemungkinan untuk tergolong dalam kategori miskin. dampak buruk dari pengangguran adalah penurunan pendapatan yang berdampak pada berkurangnya kesejahteraan yang dimiliki individu.

Pengangguran merujuk pada penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja BPS (2021) mendefinisikan. Dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh seseorang terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Risiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan akan semakin besar apabila pengangguran berlangsung lama atau terjadi secara berulang dengan pekerjaan yang tidak stabil. Sebaliknya, ketika individu kembali bekerja, pendapatan akan meningkat sehingga risiko kemiskinan menurun (Gebel & Gundert, 2023).

Gambar 1.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Aceh Tahun
2020 – 2024



Sumber: BPS Provinsi Aceh (2024)

Berdasarkan gambar 1.6, perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran tercatat sebesar 6,59%, kemudian menurun menjadi 6,30% pada tahun 2021, dan kembali turun menjadi 6,17% pada tahun 2022. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 6,03%, hingga mencapai 5,75% pada tahun 2024 sebagai nilai terendah selama periode pengamatan. Namun demikian, penurunan pengangguran tersebut ternyata belum mampu menekan angka kemiskinan, mengingat angka kemiskinan Aceh hanya berkurang sebesar 0,75% selama lima tahun terakhir dan tetap menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan penelitian terdahulu, mengenai pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), penyaluran zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan, masih ditemukan perbedaan hasil. Pada variabel I-HDI, penelitian yang dilakukan oleh Vinta dan Rosyidah (2023) menemukan bahwa I-HDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Nurhalim *et al.* (2022) menemukan I-HDI berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Pada variabel zakat, Prasajo dan Khorunisa (2020) menemukan bahwa zakat berpengaruh signifikan dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan Widiastuti dan Kosasih (2021) menunjukkan pengaruh ZIS terhadap kemiskinan tidak signifikan. Sementara itu, pada variabel pengangguran, Anggraini (2024) menemukan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, Prasajo dan Khorunisa (2020) menemukan pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Di samping adanya inkonsistensi hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji satu atau dua variabel utama secara terpisah. Penelitian yang mengombinasikan I-HDI, penyaluran zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam satu model penelitian masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selain itu, sebagian besar penelitian kemiskinan di Provinsi Aceh masih menggunakan indikator pembangunan manusia konvensional, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berfokus pada dimensi materiil

murni seperti pada penelitian Baihaqi dan Puspitasari (2020) serta Adrian dan Lutfi (2023). Padahal, karakteristik Aceh yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia karena adanya penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, pengukuran kesejahteraan masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual dan pemenuhan lima unsur pokok manusia berdasarkan prinsip maqashid syariah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan pengamatan fenomena dan terdapatnya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2020–2024 (Studi pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Human Development Index (I-HDI)* berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Apakah Penyaluran Zakat berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh?
4. Apakah *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara

bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya memiliki tujuan tertentu, Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Menambah literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada level regional
2. Manfaat Praktis: Memberikan informasi berbasis data mengenai faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi kemiskinan.
3. Manfaat Kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan menjadi

bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh.

4. Manfaat Sistematis: Menjadi referensi metode penelitian kuantitatif berbasis data sekunder untuk kajian berikutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk dapat mempermudah pemahaman dari awal sampai akhir dari proposal ini maka penulis menerangkan sistematika penelitian seperti yang tersebut dibawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan isi pembahasan. Pada bab ini mengemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti. Pada bab ini juga membahas hubungan antar variabel, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti, serta alasan untuk menggunakan metode tersebut. Penjelasan juga mencakup jenis penelitian yang digunakan,

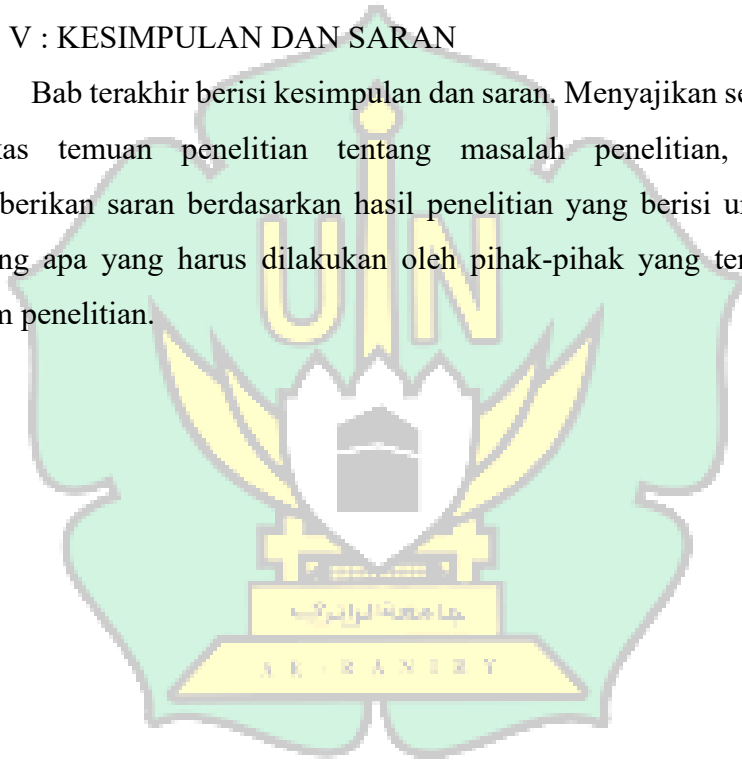
lokasi penelitian, jenis data yang dikumpulkan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, pembagian pembahasan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, dan rumus masalah atau fokus penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Menyajikan secara ringkas temuan penelitian tentang masalah penelitian, dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang berisi uraian tentang apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya bermula ketika masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama konsumsi seperti sandang dan pangan, sehingga berdampak pada terabaikannya pemenuhan kebutuhan lainnya. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi, sehingga manfaat pembangunan tidak terjangkau. *World Bank* (2020) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang tidak mampu dalam memenuhi standar hidup minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan internasional. Menurut Subandi (2016) kemiskinan dapat disebabkan karena sifat alamiah yaitu masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan kepemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Di samping itu, kemiskinan dapat disebabkan oleh masalah struktural yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan.

Menurut Todaro (2020) kemiskinan merupakan kondisi ketika individu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Secara luas, kemiskinan diartikan kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, kondisi

kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Teori kemiskinan juga mencakup konsep "kemiskinan multidimensi," yang mengakui bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Lebih lanjut, Mubyarto (dalam Fitriani 2024) menjelaskan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya keterampilan, produktivitas, pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Kemiskinan juga didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki aset-aset seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain.

Selain dipandang sebagai keterbatasan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, kemiskinan juga dapat dijelaskan melalui pendekatan kapabilitas (*Capability Approach*) yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Menurut Sen (1999) kemiskinan tidak hanya berarti rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan (*functionings*) yang diinginkan. Kapabilitas tersebut mencakup kemampuan untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai bentuk deprivasi kapabilitas yang menyebabkan seseorang tidak mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Pendekatan ini

menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan berbagai kesempatan yang mendukung pembangunan manusia.

2.1.2 Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, kemiskinan tidak hanya berfokus pada dimensi ekonomi semata, melainkan juga menyentuh aspek moral, spiritual, dan sosial. Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, kemiskinan dipandang sebagai permasalahan sosial yang perlu diatasi. Islam juga mengajarkan bahwa kemiskinan bisa menjadi ujian yang mengukur ketakwaan dan kesabaran seseorang dalam menghadapi cobaan hidup. Namun, Islam juga menekankan pentingnya usaha untuk mengatasi kemiskinan melalui prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan solidaritas antar anggota masyarakat (Agus, 2024). Menurut Qardhawi (1995) akibat dari kemiskinan akan menimbulkan bahaya yang mengancam individu maupun masyarakat. Bahaya tersebut akan mengancam akidah/iman, dan akhlak/moral.

Islam membagi kemiskinan ke dalam dua kategori yaitu fakir dan miskin. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan kemiskinan. Kata fakir dijumpa dalam al-Qur'an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali. Definisi fakir menurut islam yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan karena ada sebab khusus

yang syar'i (uzur syar'i) seperti usia tua, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat mencari nafkah. Sedangkan pengertian orang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan (Maulana *et al.*, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dipandang sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya mencerminkan kekurangan pada aspek pendapatan dan kebutuhan material, tetapi juga keterbatasan kapabilitas individu dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam Islam, kemiskinan juga berkaitan dengan dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menekankan pentingnya keadilan distribusi kekayaan, solidaritas sosial, serta tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna mencapai kehidupan yang *falah* baik di dunia maupun di akhirat.

2.1.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Chamber (dalam Hamdani *et al.*, 2024) kemiskinan dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketika tingkat pendapatan atau kemampuan ekonomi seseorang berada di bawah batas minimum sehingga kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup tidak dapat terpenuhi. Kondisi ini diukur berdasarkan standar kebutuhan minimum yang

mencakup kebutuhan makanan serta kebutuhan nonmakanan yang bersifat esensial bagi kehidupan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi kemiskinan yang diukur berdasarkan tingkat kesenjangan pendapatan dalam masyarakat dibandingkan dengan rata-rata pendapatan yang berlaku. Konsep ini menunjukkan bahwa seseorang dikategorikan miskin apabila tingkat pendapatannya berada jauh di bawah standar rata-rata masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, ukuran kemiskinan relatif dapat berbeda antarnegara maupun antarperiode dalam suatu negara, tergantung pada tingkat kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi akibat adanya ketimpangan dalam sistem sosial, ekonomi, maupun kebijakan yang membatasi akses dan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam kondisi ini, masyarakat tetap berada dalam kemiskinan meskipun telah bekerja keras dan memiliki motivasi yang tinggi, karena struktur dan tatanan yang ada tidak memberikan ruang yang memadai untuk berkembang dan keluar dari kondisi miskin.

4. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan kondisi yang disebabkan oleh faktor budaya dan pola perilaku masyarakat, seperti rendahnya etos kerja, kurangnya kedisiplinan, sikap malas, serta rendahnya motivasi untuk bekerja keras dan meningkatkan taraf hidup. Kondisi tersebut dapat menghambat masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia sehingga menyebabkan kemiskinan terus berlangsung.

Kemiskinan juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Menurut sifatnya, kemiskinan struktural terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan yang terjadi akibat keterbatasan sumber daya alam, minimnya fasilitas umum, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, seperti lahan yang kurang subur.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan yang muncul akibat proses pembangunan dan modernisasi yang tidak merata, sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses dan mengendalikan sumber daya maupun infrastruktur yang tersedia.

2.1.4 Pengukuran Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat serta menentukan apakah seseorang atau kelompok masyarakat tergolong miskin atau tidak. Di Indonesia pengukuran kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam pendekatan ini, penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2024).

1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai minimum pengeluaran yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Garis kemiskinan Makanan (GKM) diwakili oleh 52 jenis komoditi, beberapa di antaranya adalah padi, ikan, susu, sayuran, buah-buahan, minyak, dan beberapa jenis lainnya. Garis kemiskinan Makanan (GKM) yang diatur oleh BPS yaitu mengukur nilai pengeluaran kebutuhan makanan yang disetarakan dengan kebutuhan kkalori per hari per kapita yaitu minimal 2.100 kkalori. Komponen selanjutnya adalah Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), pada komponen ini yang diukur adalah kebutuhan minimum berupa perumahan, sandang, pendidikan, hingga kesehatan. Dalam komoditi ini diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan serta 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis

Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin. BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar atau *basic needs approach* sebagai dasar pengukuran kemiskinan (BPS, 2024).

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indikator ini menunjukkan seberapa jauh tingkat pengeluaran masyarakat miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh kondisi masyarakat miskin dari standar hidup minimum (BPS, 2024).

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks keparahan kemiskinan (P2) yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin. Indeks ini memberikan gambaran mengenai tingkat keparahan kemiskinan dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai P2, maka semakin besar ketimpangan di antara penduduk miskin dan semakin berat kondisi kemiskinan yang terjadi (BPS, 2024).

4. Persentase Penduduk Miskin (P0)

Indeks kemiskinan P0 atau *Head Count Index* digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P0,

maka semakin besar proporsi penduduk miskin dalam suatu wilayah (BPS, 2024).

2.1.5 Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*), kemiskinan terjadi karena adanya siklus yang saling berkaitan antara rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, rendahnya tabungan, dan rendahnya investasi. Keterbatasan modal dan akses ekonomi menyebabkan produktivitas masyarakat tetap rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan. Rendahnya pendapatan berujung pada rendahnya pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya memperkuat kondisi kemiskinan. Siklus tersebut terus berulang dan menyebabkan masyarakat sulit keluar dari kemiskinan tanpa dukungan kebijakan dan pembangunan yang memadai (Rohima & Budiyanto, 2024).

Menurut Kuncoro dalam Rohima & Budiyanto (2024) faktor-faktor berikut menyebabkan kemiskinan:

1. Secara makro, kemiskinan dapat muncul akibat ketidaksamaan dalam penguasaan dan kepemilikan sumber daya ekonomi yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Kondisi ini mengakibatkan kelompok masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dengan kualitas yang relatif rendah, sehingga kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup menjadi terbatas.

2. Kemiskinan muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan dalam aspek pendidikan, keterampilan, dan kesehatan menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan yang diperoleh.
3. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap modal, kesempatan ekonomi, serta berbagai fasilitas pendukung pembangunan. Keterbatasan akses tersebut mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan memperluas peluang ekonomi yang tersedia. Akibatnya, individu atau kelompok masyarakat cenderung mengalami hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan, sehingga kondisi kemiskinan berpotensi berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut Solikaturun *et al.* (2014) kemiskinan merupakan kondisi yang timbul akibat keterbatasan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar serta rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Ada beberapa penyebab kemiskinan yang dapat dipahami:

1. Penyebab individual, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterampilan, kemampuan, serta keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi.

2. Penyebab keluarga dan subkultural, yaitu kemiskinan yang dipengaruhi oleh kondisi keluarga, tingkat pendidikan, serta nilai dan pola perilaku yang berkembang dalam lingkungan sosial dan diwariskan antar generasi.
3. Penyebab agensi, yaitu kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian, konflik, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan teknologi.
4. Penyebab struktural, yaitu kemiskinan yang timbul akibat ketimpangan struktur sosial, distribusi pendapatan yang tidak merata, serta kebijakan pembangunan yang belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.2.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk mengukur capaian pembangunan manusia secara lebih komprehensif. Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, IPM menilai kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2020). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan angka harapan hidup untuk mengukur dimensi kesehatan, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah untuk dimensi pendidikan, serta

pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan untuk dimensi standar hidup layak (BPS, 2021).

IPM digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah. (Efendi *et al.*, 2024). Meskipun mampu menggambarkan kualitas pembangunan manusia, IPM dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi spiritual dan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, dikembangkan *Islamic Human Development Index* (I-HDI) yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam pengukuran pembangunan manusia.

2.2.2 *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan pengembangan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengukuran pembangunan manusia melalui pendekatan maqashid syariah. Pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator konvensional seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dinilai belum sepenuhnya mampu menggambarkan tingkat pembangunan di negara-negara Muslim karena hanya mengukur pada aspek material dan fisik, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Rochmah & Sukmana, 2019). I-HDI hadir sebagai alternatif pengukuran pencapaian tingkat pembangunan manusia yang didasari oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam kerangka maqashid syariah.

Maqashid syariah merujuk pada nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, ataupun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Konsep maqashid syariah merupakan salah satu konsep yang penting dan mendasar dalam Islam, yang menegaskan bahwa kehadiran Islam untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia (Besri & Hisyam, 2024). Dengan demikian, inti dari konsep maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dengan menarik manfaat dan menolak mudarat. Menurut Asy-Syatibi (1920) maqashid syariah pada dasarnya terdiri atas lima dimensi utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) yang mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material.

I-HDI merupakan indeks yang dibangun berdasarkan dimensi-dimensi maqashid syariah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, melindungi keturunan, dan menjaga kekayaan. Dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar pada lima dimensi maqashid syariah maka akan menjadi syarat tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat atau disebut dengan *falah* (Rafsanjani, 2018). Konsep I-HDI pertama kali diperkenalkan oleh MB Hendrie Anto pada tahun 2009. Dalam pengembangan metode pengukurannya, Anto (2009) menambahkan dimensi kebebasan dan lingkungan selain dari lima dimensi utama

maqashid syariah. Namun, menurut Asy-Syatibi (1920) maqashid syariah pada dasarnya terdiri atas lima dimensi utama . Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan pengukuran I-HDI berdasarkan lima dimensi maqashid syariah tanpa menambahkan dimensi lain di luar konsep dasar tersebut.

I-HDI digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia berdasarkan terpenuhinya kebutuhan dasar, baik yang bersifat material maupun non-material, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui pendekatan maqashid syariah. Menurut Asy-Syatibi (1920) kelima dimensi maqashid syariah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara seimbang agar kesejahteraan hidup manusia dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, apabila salah satu dimensi tersebut tidak terpenuhi, maka kesejahteraan hidup manusia tidak dapat terwujud secara sempurna (Rafsanjani, 2018). Berdasarkan pemenuhan lima kebutuhan dasar maqashid syariah, maka kesejahteraan dalam Islam dapat dijelaskan melalui formula berikut:

$$\text{WH} : f(\text{MW}, \text{NW})$$

$$\text{MW} : f(\text{PO}, \text{DE})$$

$$\text{NW} : f(\text{IEV})$$

$$\text{IEV} : f(\text{LE}, \text{E}, \text{FSR}, \text{R})$$

Dimana:

WH : *Welfare Holistic*

MW : *Material Welfare*

NW : *Non Material Welfare*

PO : *Property Ownership*
DE : *Distributional Equity*
IEV : *Islamic Environment and Values*
LE : *Life Expectancy*
E : *Education*
FSR : *Family and Social Relationship*
R : *Religiosity*

Berdasarkan rumus tersebut, dapat diketahui bahwa kesejahteraan holistik (WH) dalam Islam menyangkut baik kesejahteraan materi (MW) dan kesejahteraan non materi (NW). Kesejahteraan materi (MW) dipengaruhi oleh kepemilikan harta atas individu (PO) dan distribusi pendapatan (DE). Sementara itu, kesejahteraan non materi dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam (IEV) yang terdiri dari kesehatan (LE), pendidikan (E), keluarga atau keturunan (FSR), dan keagamaan (R).

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan maqashid syariah, dibentuk sebuah indeks terukur yang digunakan untuk mengukur I-HDI. Indeks yang diusulkan untuk mengukur semua dimensi maqashid syariah disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indeks Dimensi I-HDI

Tujuan Pembangunan	Dimensi	Indeks Dimensi
Maslahah	<i>Hifdz ad-Dien</i>	Indeks <i>ad-Dien</i>
	<i>Hifdz an-Nafs</i>	Indeks <i>an-Nafs</i>
	<i>Hifdz al-‘Aql</i>	Indeks <i>al-‘Aql</i>
	<i>Hifdz an-Nasl</i>	Indeks <i>an-Nasl</i>
	<i>Hifdz al-Mal</i>	Indeks <i>al-Mal</i>

Sumber: Anto (2009)

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dipahami bahwa tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam berorientasi pada tercapainya *maslahah* atau kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Konsep *maslahah* tersebut mencakup lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam mengukur pencapaian dari masing-masing dimensi tersebut, dibentuk suatu indeks yang merepresentasikan setiap aspek maqashid syariah. Lima indeks yang digunakan meliputi Indeks *ad-Dien* sebagai representasi dimensi agama, Indeks *an-Nafs* untuk dimensi kesehatan dan umur panjang, Indeks *al-‘Aql* untuk dimensi pengetahuan, Indeks *an-Nasl* untuk dimensi keluarga dan keturunan, serta Indeks *al-Mal* yang merepresentasikan dimensi pendapatan atau kesejahteraan ekonomi.

2.2.3 Indikator Penyusun *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

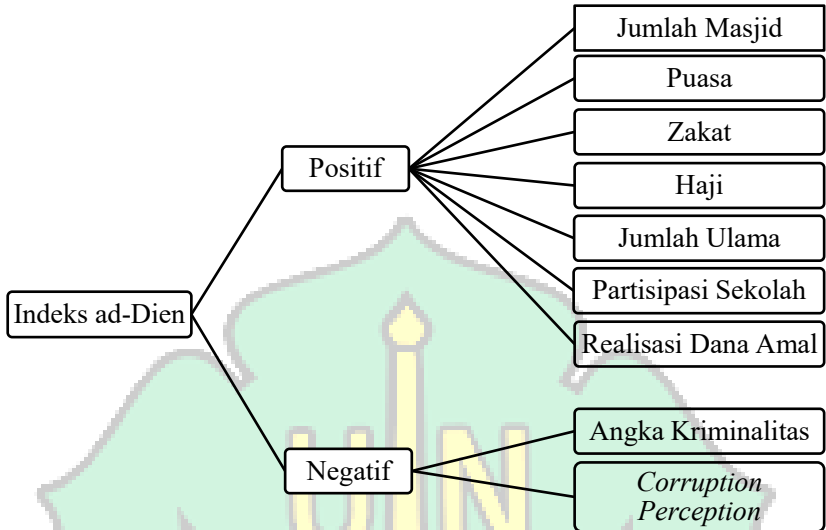
Nilai dari setiap indeks dihitung berdasarkan indikator-indikator yang merepresentasikan masing-masing dimensi maqashid

syariah. Adapun penjelasan mengenai masing-masing dimensi, indeks, beserta indikator yang digunakan dalam pengukuran I-HDI adalah sebagai berikut:

1. *Hifdz ad-Dien* (Memelihara Agama)

Hifdz ad-Dien merupakan salah satu tujuan utama maqashid syariah yang berkaitan dengan upaya menjaga dan memelihara agama. Dimensi ini menekankan pentingnya pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam perspektif pembangunan Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Pengukuran dimensi *Hifdz ad-Dien* dilakukan melalui Indeks *ad-Dien*, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan tingkat pemeliharaan agama. Menurut Rafsanjani (2018), indikator potensial yang digunakan dalam penyusunan Indeks *ad-Dien* meliputi:

Gambar 2.1
Indikator Potensial untuk Indeks ad-Dien



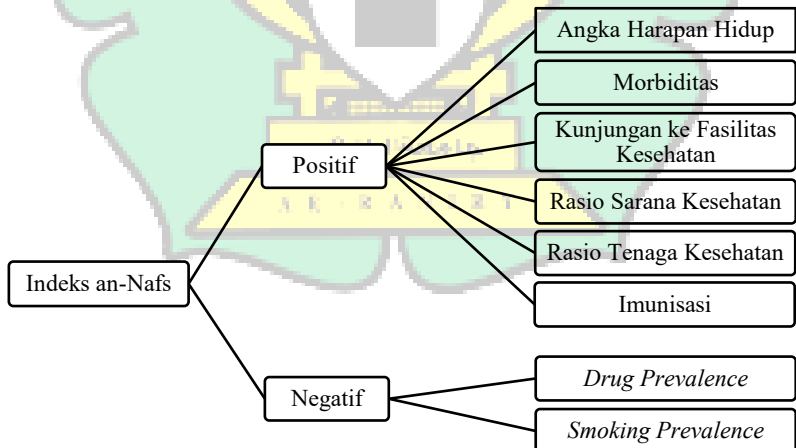
Sumber: Rafsanjani (2018)

Berdasarkan Gambar 2.1, terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk membentuk Indeks *ad-Dien*. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Indikator positif sebagian besar bersumber dari implementasi rukun Islam, kecuali syahadat, yang meliputi jumlah masjid, tingkat pelaksanaan puasa, zakat, haji, jumlah ulama, partisipasi dalam pendidikan keagamaan, serta realisasi dana sosial keagamaan. Sementara itu, indikator negatif terdiri atas angka kriminalitas dan *Corruption Perception Index* (CPI), yang digunakan untuk menggambarkan tingkat penyimpangan terhadap nilai-nilai agama dalam masyarakat.

2. *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Hifdz an-Nafs merupakan salah satu dimensi maqashid syariah yang berkaitan dengan upaya menjaga dan memelihara jiwa manusia. Islam sangat menghargai jiwa setiap manusia sehingga harus dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk tindakan yang menghilangkan nyawa, baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Pengukuran dimensi *Hifdz an-Nafs* dilakukan melalui Indeks an-Nafs, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan tingkat pemeliharaan jiwa. Menurut Rafsanjani (2018), indikator potensial yang digunakan dalam penyusunan Indeks an-Nafs, meliputi:

Gambar 2.2
Indikator Potensial untuk Indeks an-Nafs



Sumber: Rafsanjani (2018)

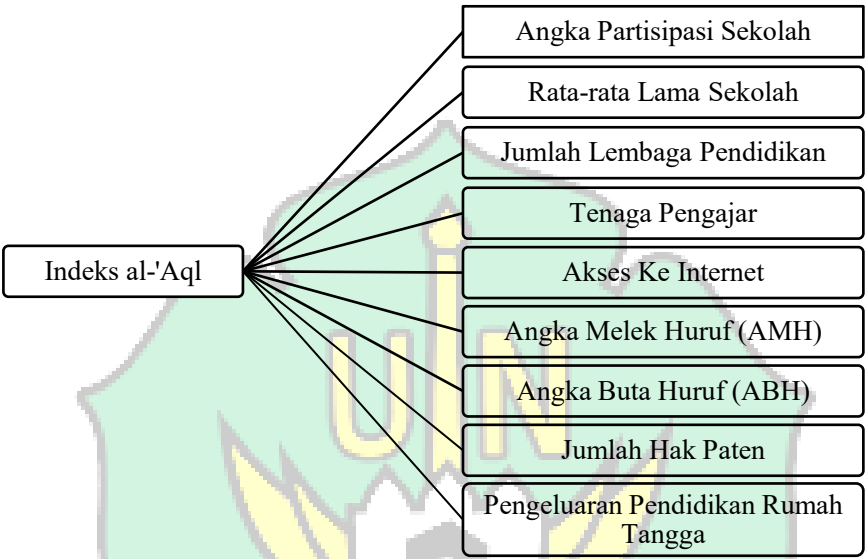
Berdasarkan Gambar 2.2, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk Indeks an-Nafs, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi pemeliharaan jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dalam maqashid syariah. Secara umum, indikator tersebut dikelompokkan menjadi indikator positif dan indikator negatif. Indikator positif meliputi angka harapan hidup, tingkat morbiditas, kunjungan ke fasilitas kesehatan, ketersediaan sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan cakupan imunisasi. Sementara itu, indikator negatif terdiri atas prevalensi penyalahgunaan narkoba (*drug prevalence*) dan prevalensi merokok (*smoking prevalence*), yang mencerminkan kondisi yang dapat mengganggu kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

3. *Hifdz al-'Aql* (Memelihara Akal)

Hifdz al-'Aql merupakan dimensi maqashid syariah yang berkaitan dengan upaya menjaga dan memelihara akal. Dalam Islam, akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya sehingga harus dijaga dan dikembangkan serta dijauhkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dalam konteks pembangunan, dimensi ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta inovasi yang mendukung kemajuan masyarakat. Pengukuran dimensi *Hifdz al-'Aql* dilakukan melalui Indeks al-'Aql, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan tingkat pemeliharaan akal.

Menurut Rafsanjani (2018), indikator potensial yang digunakan dalam penyusunan Indeks al-‘Aql, meliputi:

Gambar 2.3
Indikator Potensial untuk Indeks al-‘Aql



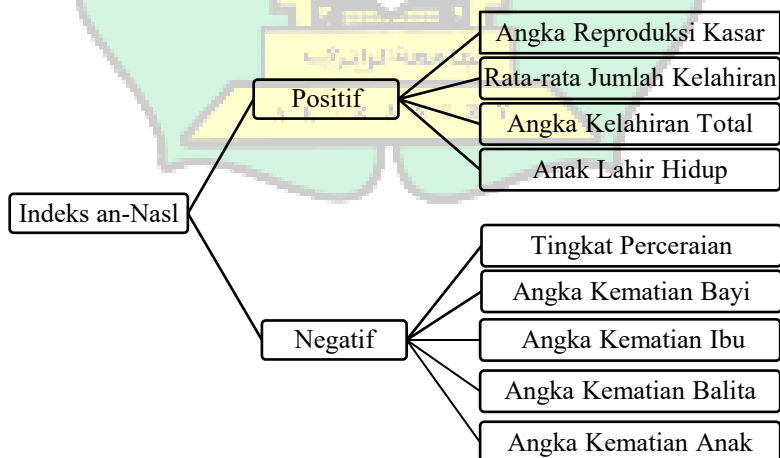
Sumber: Rafsanjani (2018)

Berdasarkan Gambar 2.3, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk Indeks al-‘Aql, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi pemeliharaan akal (*Hifdz al-‘Aql*). Dimensi ini mencerminkan tingkat pengetahuan dan kualitas pendidikan masyarakat. Adapun indikator yang dapat digunakan meliputi angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, jumlah lembaga pendidikan, jumlah tenaga pengajar, akses terhadap internet, angka melek huruf, angka buta huruf, jumlah hak paten, serta pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.

4. *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Hifdz an-Nasl merupakan dimensi maqashid syariah yang berkaitan dengan upaya menjaga dan memelihara keturunan. Dalam Islam, pemeliharaan keturunan dilakukan melalui pernikahan yang sah serta perlindungan terhadap hak-hak anak dan keluarga guna menjaga keberlangsungan nasab. Dalam perspektif pembangunan Islam, *Hifdz an-Nasl* mencerminkan tanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan generasi saat ini maupun generasi mendatang. Pengukuran dimensi *Hifdz an-Nasl* dilakukan melalui Indeks *an-Nasl*, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan tingkat pemeliharaan keturunan. Menurut Rafsanjani (2018), indikator potensial yang digunakan dalam penyusunan Indeks *an-Nasl*, meliputi:

Gambar 2.4
Indikator Potensial untuk Indeks *an-Nasl*



Sumber: Rafsanjani (2018)

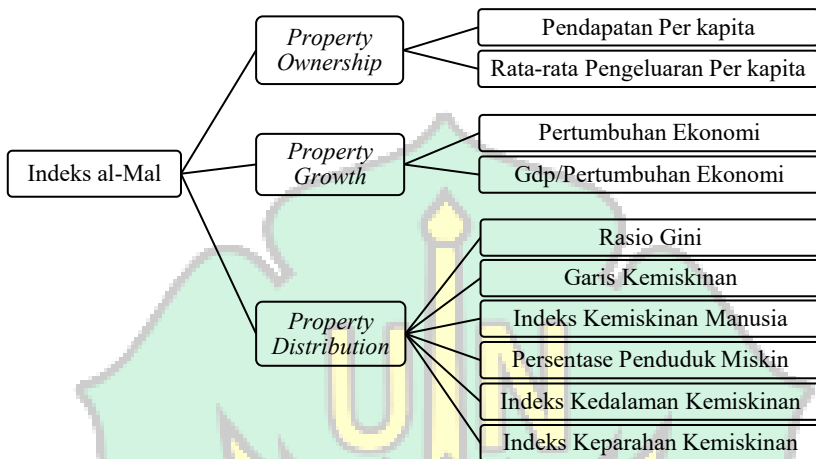
Berdasarkan Gambar 2.4, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk Indeks an-Nasl, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi pemeliharaan keturunan (*Hifdz an-Nasl*). Indikator-indikator tersebut dikelompokkan menjadi indikator positif dan indikator negatif. Indikator positif meliputi angka reproduksi kasar, rata-rata jumlah kelahiran, angka kelahiran total, dan jumlah anak lahir hidup, yang mencerminkan keberlangsungan generasi. Sementara itu, indikator negatif terdiri atas tingkat perceraian, angka kematian bayi, angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian anak, yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kualitas dan keberlanjutan keturunan.

5. *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)

Hifdz al-Mal merupakan dimensi maqashid syariah yang berkaitan dengan upaya menjaga dan memelihara harta. Dalam Islam, harta dipandang sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mendukung keberlangsungan hidup manusia sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan secara produktif. Namun, Islam juga menegaskan bahwa perolehan dan penggunaan harta harus dilakukan melalui cara-cara yang halal serta terhindar dari praktik yang batil. Pengukuran dimensi *Hifdz al-Mal* dilakukan melalui Indeks al-Mal, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan tingkat pemeliharaan harta.

Menurut Rafsanjani (2018), indikator potensial yang digunakan dalam penyusunan Indeks al-Mal, meliputi:

Gambar 2.5
Indikator Potensial untuk Indeks al-Mal



Sumber: Rafsanjani (2018)

Berdasarkan Gambar 2.5, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk Indeks al-Mal, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur dimensi pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mal*) atau tingkat kesejahteraan ekonomi. Secara umum, indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu kepemilikan harta, pertumbuhan pendapatan, dan distribusi pendapatan. Indikator yang merepresentasikan kepemilikan harta meliputi pendapatan per kapita dan rata-rata pengeluaran per kapita. Aspek pertumbuhan pendapatan diukur melalui pertumbuhan ekonomi serta rasio Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap jumlah penduduk. Sementara itu, aspek distribusi

pendapatan diukur menggunakan rasio gini, garis kemiskinan, indeks kemiskinan manusia, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat.

2.3 Penyaluran Zakat

2.3.1 Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, sebagai bentuk ketaatan umat kepada Allah SWT serta sebagai sarana untuk membantu sesama umat. Secara bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan secara istilah zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik), dengan persyaratan tertentu (Suryana *et al.*, 2024). Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah saling berhubungan, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan bersih.

Menurut istilah fiqih, zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat dan nisab untuk diberikan kepada golongan yang memenuhi kriteria

sebagai penerima zakat. Zakat bukan sekadar tindakan menyumbangkan sejumlah uang atau harta belaka, tetapi juga merujuk pada harta yang dikeluarkan itu sendiri. Zakat memberikan makna lebih pada kekayaan dan melindunginya dari kerusakan. Mengeluarkan zakat tidak hanya membersihkan harta dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), tetapi juga membawa keberkahan dan meningkatkan kualitas hidupnya (Humam & Hanif, 2024).

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat Muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Menurut Qardhawi (2005) zakat merupakan *maalayah ijtimai'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai pemerataan karunia Allah, memperkuat solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa serta penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah.

Dengan demikian, zakat tidak hanya dimaknai sebagai penyerahan sebagian harta, tetapi juga sebagai sarana penyucian jiwa dan harta yang diyakini dapat mendatangkan keberkahan bagi muzakki. Selain itu, zakat juga mengandung fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Zakat berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi,

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyaluran zakat kepada mustahik, kebutuhan dasar kelompok yang kurang mampu dapat terpenuhi sehingga zakat tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

2.3.2 Landasan Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an, terdapat sekitar 82 ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas dan menyejajarkan kewajiban menunaikan zakat dan shalat. 30 di antaranya disebutkan dengan kalimat *ma'rifah*, yang berarti zakat harta, dan 28 di antaranya dikaitkan dengan kewajiban shalat. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam syariat Islam (Lailatul Zannah *et al.*, 2024). Beberapa ayat utamanya meliputi:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk* (QS. Al-Baqarah: 43).

2. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman*

bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah ayat: 103).

Di Indonesia, zakat tidak hanya memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist dan ijma', tetapi zakat juga telah diatur dalam hukum positif. Pengelolaan zakat saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat setelah sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Tambunan, 2021).

2.3.3 Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar, zakat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berdasarkan objeknya, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah, merupakan zakat yang harus dibayar oleh setiap umat Islam menjelang hari raya Idulfitri. Zakat ini ditetapkan pada satu sha', atau setara dengan $\pm 2,5$ kg makanan pokok beras, setara dengan 3,5 liter beras perorang. Ada beberapa jenis makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membayar zakat fitrah, yaitu Kurma, Gandum, Tepung terigu, Beras, Jagung, Anggur kering, Sagu, dan Ubi. Tujuan zakat ini adalah untuk membersihkan (mensucikan) jiwa dan harta seseorang dari perbuatan sia-sia

dan dosa selama bulan Ramadan, serta untuk membantu orang miskin selama hari raya (Harahab, 2024).

2. Zakat Mal

Zakat mal berlaku untuk harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Uang, emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil tambang adalah semua jenis harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab (ambang batas minimum harta) dan haul (masa kepemilikan tahunan). Zakat mal biasanya dibayarkan sebesar 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul (Harahab, 2024).

2.3.4 Syarat dan Ketentuan Zakat

Zakat tidak dapat diberikan secara sembarangan karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diterima dan sah. Beberapa syarat umum untuk zakat adalah sebagai berikut:

1. Islam: Zakat diwajibkan hanya kepada mereka yang beragama Islam.
2. Baligh dan berakal: Ini berlaku untuk zakat mal karena berkaitan dengan kepemilikan harta.
3. Memiliki harta secara penuh: Harta yang dizakati harus dimiliki dan dikuasai sepenuhnya.
4. Dibatasi nisab: Harta yang dizakati harus melebihi ambang batas tertentu.
5. Haul: Harta harus dimiliki selama satu tahun penuh untuk zakat mal.

Syarat untuk zakat fitrah adalah seorang muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada malam Idulfitri, terlepas dari usianya, atau bayi yang baru lahir. Sementara itu, mengenai siapa yang berhak menerima zakat, agama Islam menetapkan delapan kelompok atau asnaf. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata dimasyarakat (Harahab, 2024).

2.3.5 Penyaluran Zakat

Penyaluran Zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana Zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Lembaga zakat merupakan institusi yang memiliki peran dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Melalui pengumpulan ini, lembaga zakat dapat mengakumulasi dana yang signifikan untuk digunakan dalam program-program redistribusi kekayaan. Selain itu, lembaga zakat memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan dana zakat tersebut secara adil dan merata kepada mereka yang berhak menerima (Rosanti & Darmaningrum, 2023). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penyaluran zakat merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki.

2.3.6 Golongan (asnaf) Penerima Zakat

Berdasarkan ketentuan Surah At-Taubah ayat 60, zakat disalurkan kepada delapan golongan (asnaf), yaitu:

1. Fakir: Mereka yang tidak memiliki harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
2. Miskin: Mereka yang memiliki harta atau pekerjaan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
3. Amil: Pengelola atau panitia yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf: Seseorang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat iman.
5. Riqab: Hamba sahaya yang ingin menebus dirinya agar merdeka.
6. Gharimin: Orang yang berhutang demi kemaslahatan, atau untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak sanggup membayarnya.
7. Fisabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk dakwah, pendidikan, atau jihad.
8. Ibnu Sabil: Musafir (orang yang sedang dalam perjalanan) yang kehabisan bekal di tengah jalan dalam tujuan kebaikan (Bahri & Khumaini, 2020) .

2.3.7 Metode Penyaluran Zakat

Secara umum, penyaluran zakat dapat dilakukan dengan dua cara utama, yaitu:

1. Secara Langsung

Muzaki membagikan langsung zakatnya kepada mustahik di lingkungan terdekat (keluarga atau tetangga) dengan menjaga asas kerahasiaan dan kepatutan.

2. Secara tidak Langsung

Penyaluran ini melibatkan pihak ketiga, yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk mengelola dan mendistribusikan dana (Suryani & Fitriani, 2022).

2.3.8 Bentuk Penyaluran Zakat

Menurut Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018, pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat yang disesuaikan dengan kemaslahatan mustahik dan diklasifikasikan kedalam 2 bentuk penyaluran, yaitu:

1. Zakat Konsumtif

Penyaluran zakat yang diberikan langsung kepada mustahik dan bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (seperti makanan pokok atau uang tunai untuk kebutuhan mendesak).

2. Zakat Produktif

Penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja, sarana usaha, atau keterampilan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi, kemandirian ekonomi, dan taraf hidup mustahik agar lebih produktif ke depannya (Bahri & Khumaini, 2020).

2.4 Pengangguran

2.4.1 Definisi Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) merupakan masalah yang selalu hampir ada dalam setiap pembangunan perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja (*labor force*) untuk memperoleh pekerjaan sesuai yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Menurut Sukirno (2019) pengangguran adalah keadaan dimana seorang anggota angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum menemukannya. Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (2021) merujuk pada penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Dengan kata lain, pengangguran merujuk pada situasi atau keadaan dimana seseorang menghadapi ketiadaan kesempatan kerja.

Menurut Prawoto (2019) pengangguran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat karena kurangnya kesempatan kerja bagi mereka yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak adanya pemerataan kesempatan kerja menyebabkan banyak pengangguran dan keterbelakangan perkembangan teknologi menyebabkan sulitnya penciptaan lapangan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang terserap bekerja pada suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh pekerjaan yang tersedia. Menurut teori Keynes rendahnya permintaan agregat merupakan penyebab

utama pengangguran, sehingga rendahnya konsumsi disebabkan oleh rendahnya produksi, bukan karena perlambatan ekonomi. Pengangguran menyebabkan kemiskinan, karena tingginya angka pengangguran mencerminkan rendahnya pendapatan masyarakat, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat (Putri et al., 2022).

Pengangguran tidaklah selalu identik dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Suparmono (2018) orang yang sudah bekerja dapat digolongkan sebagai setengah pengangguran apabila pekerjaan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya sehingga hasil akhir dari pekerjaannya di bawah produktivitas yang seharusnya. Secara lebih rinci, setengah pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Setengah penganggur kentara (*visible under-employment*) yang mencerminkan kondisi orang yang bekerja tetapi mengalami ketidakcukupan dalam volume pekerjaan yang dilakukan.
2. Setengah penganggur tak kentara (*invisible under-employment*) dapat tercermin dari adanya ketidaktepatan dalam penempatan sumber daya manusia, atau adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan faktor produksi. Hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, keterampilan yang kurang dimanfaatkan, dan rendahnya tingkat produktivitas.

2.4.2 Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Menurut Edwards (dalam Suparmono, 2018) berdasarkan kepada ciri pengangguran yang berlaku, pengangguran dapat digolongkan menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Pengangguran terbuka (*open unemployment*)

Pengangguran terbuka dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pengangguran sukarela dan pengangguran terpaksa. Pengangguran sukarela merupakan kelompok angkatan kerja yang secara sadar memilih untuk tidak bekerja karena tidak bersedia menerima tingkat upah tertentu atau karena mereka sedang mengharapkan peluang kerja yang lebih baik. Sedangkan, pengangguran terpaksa merupakan kelompok angkatan kerja yang sebenarnya sudah memiliki kesiapan dan kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah yang berlaku, namun mereka belum berhasil mendapatkan lowongan pekerjaan yang tersedia.

2. Setengah penganggur (*underemployment*)

Tenaga kerja yang termasuk setengah menganggur adalah kelompok tenaga kerja yang lamanya bekerja (dalam satuan hari, jam, ataupun minggu) kurang dari yang seharusnya mereka bisa kerjakan. Misalnya orang yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi orang tersebut malas-malasan, datang terlambat, maupun mendahului pulang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) setengah penganggur ialah mereka yang bekerja di bawah jam

kerja normal (kurang dari 35 jam/minggu).

3. Bekerja secara tidak penuh

Bekerja secara tidak penuh dapat dikelompokkan menjadi tiga kondisi utama, yaitu:

a. Pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*)

Contoh pengangguran tak kentara adalah petani yang bekerja di sawah selama sehari penuh dari pagi sampai sore. Bila dilihat dari jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan di sawah, pekerjaan tersebut tidaklah perlu dilakukan sehari penuh, melainkan cukup setengah hari saja.

b. Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*)

Penyebab pengangguran tersembunyi adalah orang yang bekerja tidak sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikannya sehingga orang tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal.

c. Pensiun awal

Pensiun awal memiliki tujuan tertentu, misalnya untuk memberi kesempatan tenaga kerja baru yang memiliki pemikiran yang lebih aplikatif maupun mengurangi tenaga kerja tua yang produktivitasnya mulai menurun.

4. Tenaga kerja lemah (*impaired*)

Kelompok ini sebenarnya memiliki pekerjaan dan bekerja secara penuh, tetapi intensitasnya rendah. Jenis

pengangguran ini dikarenakan kurang gizi maupun menderita penyakit tertentu.

5. Tenaga kerja tidak produktif

Kelompok angkatan kerja ini sebenarnya sudah memiliki pekerjaan dan mampu bekerja secara produktif, tapi karena kurangnya fasilitas yang dimiliki perusahaan mengakibatkan mereka menghasilkan pekerjaan yang tidak memuaskan. Misalnya mesin yang dimiliki sudah usang, kondisi pabrik yang tidak nyaman, maupun bahan baku yang tidak tersedia secara rutin.

2.4.3 Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan pergolongan ini pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut:

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran yang terjadi sebagai akibat dari kesulitan temporer dalam mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan lowongan yang ada. Kesulitan sementara ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat, atau dapat juga disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pelamaran dan seleksi. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai yang mencapai kesempatan kerja penuh.

Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran friksional (Nurhayati *et al.*, 2024).

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran yang tercipta akibat terjadinya perubahan siklus ekonomi seperti perlambatan atau resesi yang menyebabkan daya beli masyarakat melemah sehingga dari sisi produsen terjadi penyesuaian biaya produksi dengan melakukan pemotongan biaya termasuk untuk pemberhentian karyawan. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran siklikal (Nurhayati *et al.*, 2024).

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Misalnya petani, mereka hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, tetapi setelah itu mereka akan menganggur, inilah yang disebut pengangguran musiman (Nurhayati *et al.*, 2024).

4. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang hadir akibat adanya perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan ini dapat berupa perubahan teknologi, ketidakcocokan geografis, dan kurangnya keterampilan yang memadai. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural (Nurhayati *et al.*, 2024).

2.4.4 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka meliputi orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT diperoleh dengan cara membagi penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 persen.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penyusunan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti, menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta mengidentifikasi celah penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi dan Puspitasari (2020) berjudul “Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat, dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007–2014”. Penelitian

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel dan model *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengangguran, zakat, dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan distribusi zakat dan pertumbuhan ekonomi daerah mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, peningkatan IPM pada periode penelitian belum mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

Kedua, Prasajo dan Khorunisa (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran dan Zakat terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011–2016”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel melalui model *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, kesehatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan, dan pengangguran berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyaluran zakat memiliki peran yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sedangkan perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan selama periode penelitian.

Ketiga, Widiastuti dan Kosasih (2021) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010–2019”. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZIS berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengangguran akan meningkatkan jumlah penduduk miskin karena berkurangnya kesempatan masyarakat memperoleh pendapatan. Di sisi lain, belum signifikannya pengaruh ZIS mengindikasikan bahwa distribusi dana sosial Islam belum mampu memberikan dampak yang optimal dalam mengurangi kemiskinan pada tingkat nasional selama periode penelitian.

Keempat, Nurhalim *et al.* (2022) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Zakat dan *Islamic Human Development Index* terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017–2020”. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel dan model *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan I-HDI berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi yang nyata dalam mengurangi

tingkat kemiskinan melalui mekanisme redistribusi pendapatan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, pembangunan manusia berbasis maqashid syariah yang diukur melalui I-HDI belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dalam jangka pendek selama periode penelitian.

Kelima, Viollani et al. (2022) dalam penelitian yang berjudul “*Pengaruh Islamic Human Development Index dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan dengan Pengangguran sebagai Variabel Intervening di Indonesia Tahun 2016–2020*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel dan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa I-HDI dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, pengangguran terbukti mampu memediasi hubungan antara I-HDI dengan kemiskinan maupun hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berbasis syariah dan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menurunkan tingkat kemiskinan, baik secara langsung maupun melalui penurunan tingkat pengangguran.

Keenam, Adrian dan Lutfi (2023) melakukan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Dana ZIS, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan*”. Penelitian menggunakan pendekatan

kuantitatif dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, distribusi dana ZIS, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa distribusi dana ZIS dan kondisi pasar tenaga kerja memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kemiskinan, sementara peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diukur menggunakan IPM belum mampu secara langsung mengurangi kemiskinan pada periode penelitian.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Vinta dan Rosyidah (2023) berjudul "analisis pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode 2013–2021". Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa I-HDI berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berdasarkan perspektif maqashid syariah mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah pengangguran dapat memperbesar jumlah penduduk miskin.

Kedelapan, Harahap (2024) melakukan penelitian berjudul "Analisis Interaksi Penyaluran Zakat dan *Islamic Human*

Development Index terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2019–2022”. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Panel Vector Error Correction Model* (PVECM) pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat dan I-HDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, interaksi kedua variabel tersebut terbukti memperkuat efektivitas pengurangan kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia berbasis maqashid syariah yang pada akhirnya mempercepat penurunan tingkat kemiskinan.

Kesembilan Anggraini (2024) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh *Islamic Human Development Index*, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009–2022”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel melalui model *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menemukan bahwa I-HDI, pengangguran, dan UMK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan. I-HDI berpengaruh negatif terhadap kemiskinan yang berarti peningkatan kualitas pembangunan manusia berbasis syariah mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, pengangguran berpengaruh positif terhadap

kemiskinan yang menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah pengangguran akan memperbesar jumlah penduduk miskin. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan manusia berbasis nilai-nilai Islam dan penciptaan lapangan kerja sebagai strategi pengentasan kemiskinan.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Maslakhah dan Enggrani (2024) dengan judul Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), *Islamic Human Development Index* (I-HDI), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi periode 2018–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel melalui model *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa I-HDI dan ZIS memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berbasis syariah dan penyaluran ZIS cenderung menurunkan kemiskinan, tetapi pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Baihaqi dan Puspitasari (2020) Analisis Dampak Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat, dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2014	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).	Variabel pengangguran, zakat dan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, IPM menunjukkan pengaruh positif terhadap Kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.	Penelitian ini menggunakan indikator pembangunan manusia konvensional, yaitu IPM dan menambahkan variabel PDRB sebagai variabel independen	Sama-sama menggunakan variabel pengangguran dan zakat sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen. Sama-sama mengkaji kemiskinan di Provinsi Aceh menggunakan metode regresi data panel.

Tabel 2.2-lanjutan

2.	Prasojo dan Khorunisa (2020) Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran dan Zakat terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tahun 2011 sampai 2016.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i> (REM).	Variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan kesehatan berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Pengangguran juga ditemukan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penyaluran zakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan	Penelitian ini menambahkan variabel pendidikan dan kesehatan, sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Sama-sama meneliti variabel pengangguran dan zakat sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode regresi data panel.
----	--	---	--	---	--

Tabel 2.2-lanjutan

3.	Widiastuti dan kosasih (2021) Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2019	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda.	Variabel ZIS berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan , pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan , sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan . Artinya, setiap kenaikan pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan	Penelitian ini menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi, dan inflasi serta tidak memasukkan variabel zakat sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda.	Sama-sama meneliti variabel zakat dan pengangguran sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen.
4.	Nurhalim <i>et al.</i> (2022) Pengaruh Zakat dan <i>Islamic Human Development Index</i> terhadap	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan	Penelitian ini tidak memasukkan pengangguran sebagai variabel independen.	Sama-sama menggunakan I-HDI, zakat, sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai

Tabel 2.2-lanjutan

	Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017–2020.	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i> (REM).	terhadap tingkat kemiskinan , sedangkan IHDl memiliki pengaruh negatif, namun tidak signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan zakat berkontribusi signifikan dalam menurunkan kemiskinan		variabel dependen
5.	Viollani <i>et al.</i> (2022) <i>Pengaruh Islamic Human Development Index dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening di Indonesia</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel menggunakan analisis jalur (<i>path analysis</i>).	Variabel I-HDI dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan , sedangkan untuk variabel pengangguran dapat memediasi hubungan I-HDI terhadap kemiskinan dan.	Penelitian ini menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi dan tidak menggunakan variabel zakat sebagai variabel independen. Variabel pengangguran sebagai variabel intervening serta.	Sama-sama menggunakan variabel I-HDI sebagai variabel independen, dan kemiskinan sebagai variabel dependen.

Tabel 2.2-lanjutan

	Tahun 2016-2020.		pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan		
6.	Adrian dan Lutfi (2023) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Dana ZIS, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel.	Variabel pertumbuhan ekonomi, ZIS, tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan	Penelitian ini menggunakan indikator pembangunan manusia konvensional, yaitu IPM dan menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.	Sama-sama menggunakan variabel zakat, Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel independen, dan kemiskinan sebagai variabel dependen.
7	Vinta dan Rosyidah (2023) Pengaruh <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode 2013–2021.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda.	Variabel I-HDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan	Penelitian ini menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi dan tidak menggunakan variabel zakat sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda.	Sama-sama menggunakan variabel <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI) dan pengangguran sebagai variabel independen dan variabel kemiskinan sebagai variabel dependen

Tabel 2.2-lanjutan

			Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan I-HDI terbukti mampu menurunkan kemiskinan, sedangkan peningkatan tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi justru diikuti oleh peningkatan kemiskinan		
8.	Harahap (2024) Analisis Interaksi Penyaluran Zakat dan <i>Islamic Human Development Index</i> terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2019-2022	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik <i>purposive sampling</i> pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode <i>Panel</i>	Variabel penyaluran zakat dan I-HDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Interaksi kedua variabel memperkuat efektivitas pengentasan kemiskinan, di mana zakat berkontribusi pada	Penelitian ini tidak menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan metode <i>Panel Vector Error Correction Model</i> (PVECM) dengan pendekatan <i>Impulse Response Function</i>	Sama-sama menggunakan variabel penyaluran zakat dan <i>islamic human development index</i> sebagai variabel independen dan kemiskinan sebagai variabel dependen.

Tabel 2.2-lanjutan

		<i>Vector Error Correctio.</i>	peningkata n I-HDI yang pada akhirnya mendukung pengentasa n kemiskinan .Temuan ini menunjukk an bahwa peningkata n kualitas pembangun an manusia berdasarkan nilai-nilai maqashid syariah, mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. yang tercermin dalam I- HDI, yang pada akhirnya turut mempercep at pengentasa n kemiskinan	(IRF) dan <i>Variance Decompositi on.</i> Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2022	
--	--	--	--	--	--

Tabel 2.2-lanjutan

9.	Anggraini (2024) Pengaruh <i>Islamic Human Development Index</i> , Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).	Variabel I-HDI berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan kualitas pembangunan manusia berbasis syariah mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, Pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Disisi lain, ketimpangan pendapatan dan UMK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan	Penelitian ini menambahkan variabel ketimpangan pendapatan, dan upah minimum kabupaten serta tidak memasukkan variabel zakat sebagai variabel independen.	Sama-sama menggunakan <i>Islamic Human Development Index</i> dan pengangguran sebagai variabel independen serta kemiskinan sebagai variabel dependen. Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel.
----	--	--	---	---	--

Tabel 2.2-lanjutan

9.	Maslachah <i>et al.</i> (2024) Pengaruh zakat, infak, sedekah (ZIS), <i>Islamic Human Development Index</i> (I-HDI), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2018–2022.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).	Variabel I-HDI dan ZIS berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun I-HDI dan ZIS memiliki arah hubungan negatif terhadap kemiskinan, namun belum signifikan secara statistik.	Penelitian ini menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi dan tidak memasukkan variabel pengangguran sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi dengan periode pengamatan 2018-2022	Sama-sama menggunakan Zakat (ZIS) dan <i>Islamic Human Development Index</i> sebagai variabel independen serta kemiskinan sebagai variabel dependen. Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel
----	--	--	---	--	--

Sumber: Diolah penulis, (2026)

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu model konseptual yang menunjukkan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai elemen yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting

(Sugiyono, 2019). Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

2.6.1 Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut teori *human capital*, peningkatan kualitas manusia merupakan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan individu dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, semakin besar peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Karlsson (dalam Viollani *et al.*, 2022), strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta pemberian pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bersaing.

Menurut perspektif Islam, pembangunan manusia diwujudkan melalui konsep *Islamic Human Development Index* (I-HDI) yang dibangun berdasarkan lima dimensi maqashid syariah, yaitu *Hifdz ad-Dien* (pemeliharaan agama), *Hifdz an-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifdz al-'Aql* (pemeliharaan akal), *Hifdz an-Nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *Hifdz al-Mal* (pemeliharaan harta). Peningkatan nilai I-HDI mencerminkan semakin baiknya kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, moralitas, spiritualitas, maupun kesejahteraan ekonomi.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga menurunkan tingkat kemiskinan (Maslakhah *et al.*, 2023). Dengan demikian, I-HDI memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Semakin tinggi nilai I-HDI, maka tingkat kemiskinan cenderung semakin rendah.

Hubungan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viollani *et al.* (2022), Vinta dan Rosyidah (2023), Harahap (2024), serta Anggraini (2024). Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Arah hubungan negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai I-HDI maka tingkat kemiskinan akan semakin turun. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia dalam perspektif Islam menjadi faktor penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun penelitian Nurhalim *et al.* (2022) serta Maslakhah *et al.* (2024) menemukan bahwa I-HDI berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

2.6.2 Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan

Zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Zakat sebagai instrumen keuangan Islam memiliki kekuatan untuk memberdayakan masyarakat, terutama yang berada

dalam kondisi ekonomi lemah. Menurut Abu Ubaid Al-Qasim (dalam Suradi & Bustami, 2022) zakat sangat berperan dalam mengonstruksi keadilan sosial. zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Zakat yang disalurkan oleh muzakki kepada mustahik baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mendesak seperti pangan, sandang, dan kesehatan bagi kelompok mustahik. Selain itu zakat juga dapat disalurkan melalui modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan juga telah menjadi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di dalam Pasal 3. Sesuai dengan Pasal 3b dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Tambunan, 2021). Penyaluran zakat sebagai modal usaha, pelatihan, beasiswa, dan program penguatan UMKM dapat meningkatkan pendapatan, daya beli, dan kualitas hidup masyarakat miskin (mustahik). Namun demikian, keberhasilan penyaluran zakat juga harus didukung dengan pengelolaan zakat dengan standar tata kelola yang baik oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti akuntabilitas, transparansi, digitalisasi, dan tepat sasaran (Herianingrum *et al.*, 2024). Dengan demikian, penyaluran zakat

memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, ketika zakat dikelola dan disalurkan dengan baik, tingkat kemiskinan cenderung menurun.

Hubungan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baihaqi dan Puspitasari (2020), Prasajo dan Khorunisa (2020), Nurhalim *et al.* (2022), serta Harahap (2024) menyatakan bahwa penyaluran dana ZIS/zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Arah hubungan negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi penyaluran zakat maka kemiskinan akan semakin menurun. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran zakat efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Sebaliknya, Widiastuti dan Kosasih (2021) serta Maslakhah *et al.* (2024) menemukan bahwa pengaruh ZIS terhadap kemiskinan tidak signifikan.

2.6.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan

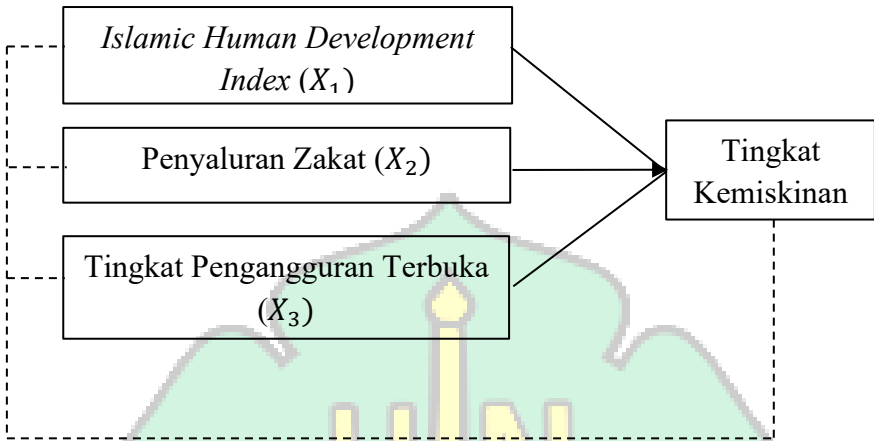
Menurut teori Keynes, rendahnya permintaan agregat merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran. Dalam pandangan ini, penurunan produksi justru disebabkan oleh rendahnya konsumsi masyarakat. Penurunan aktivitas produksi tersebut kemudian memaksa perusahaan untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja. Berkurangnya lapangan pekerjaan secara otomatis memutus sumber penghasilan masyarakat dan memicu kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran menjadi hulu dari kemiskinan, sebab tingginya angka pengangguran mencerminkan

rendahnya pendapatan nominal yang berimplikasi pada merosotnya daya beli masyarakat secara agregat (Putri *et al.*, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, Prawoto (2019) menyatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan akibat terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tidak bekerja mengakibatkan turunnya taraf hidup seseorang karena tidak adanya pendapatan yang diperoleh. Bahkan, dalam kondisi bekerja, seseorang tersebut masih memiliki kemungkinan untuk tergolong dalam kategori miskin jika upah yang diterima berada di bawah garis kemiskinan. Dampak buruk dari pengangguran adalah penurunan pendapatan yang berdampak pada berkurangnya kesejahteraan yang dimiliki individu. Oleh karena itu, pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, di mana peningkatan pengangguran cenderung diikuti peningkatan kemiskinan.

Hubungan tersebut didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiastuti dan Kosasih (2021), Adrian dan Lutfi (2023), Vinta dan Rosyidah (2023), serta Anggraini (2024). menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi pengangguran maka kemiskinan akan semakin meningkat. Akan tetapi, Prasajo dan Khorunisa (2020) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Gambar 2.6
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah penulis, (2026)

2.7 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sebagai jawaban sementara karena masih didasarkan pada teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta belum dibuktikan melalui data empiris yang diperoleh dari objek penelitian (Sugiyono, 2023:33). Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai dugaan awal yang kebenarannya perlu diuji melalui proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

H_{01} : *Islamic Human Development Index* (I-HDI) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

- H_{a1}: *Islamic Human Development Index (I-HDI)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H₀₂: Penyaluran Zakat tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{a2}: Penyaluran Zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H₀₃: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{a3}: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H₀₄: *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H_{a4}: *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono, (2023:17) penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berakar pada filsafat positivisme, metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh antar variabel yang diteliti.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah alat yang digunakan untuk menganalisis keterangan suatu pengetahuan dalam bentuk data berupa angka. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang didapatkan dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain Sugiyono (2023:194).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Tingkat Kemiskinan, data *Islamic Human Development Index* (I-HDI), data Penyaluran Zakat dan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh tahun 2020-2024, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Baitul Mal Aceh/BAZNAS dan publikasi lainnya. Data tersebut berbentuk data panel, terdiri dari data *time series* (runut waktu) yaitu periode tahun 2020-2024 ($n = 5$) dan data silang (*cross-section data*) 23 Kabupaten/Kota di Aceh.

3.3 Populasi

Menurut Sugiyono (2023:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh yang berjumlah 23 unit, terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota periode tahun 2020-2024.

3.4 Variabel Penelitian

3.5 Klasifikasi Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2023:69). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan (P_0).

2. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono 2023:69). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

3.5.1 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mengaitkan 4 (empat) variabel yang mencakup satu variabel terikat yaitu kemiskinan dan 3 (tiga) variabel bebas yaitu *Islamic Human Development Index* (I-HDI), penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Dalam penelitian ini, kemiskinan diukur menggunakan persentase penduduk miskin (P0) yaitu Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data dinyatakan dalam satuan persen (%) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

2. *Islamic Human Development Index (I-HDI)*

I-HDI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia berdasarkan perspektif Islam. Konsep I-HDI berlandaskan pada prinsip maqashid syariah yang mencakup lima dimensi utama, yaitu menjaga agama (*Hifdz ad-Dien*), menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifdz al-Mal*). Kelima dimensi tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup (*falah*), baik di dunia maupun di akhirat (P3EI, 2015). Kemudian dari kelima dimensi tersebut dikembangkan dan diperbaharui konsepnya menjadi sebuah indeks dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks pembangunan manusia berdasarkan perspektif Islam (Anto, 2009).

I-HDI disusun sebagai model pengukuran yang menggabungkan berbagai aspek pembangunan manusia berbasis nilai-nilai Islam ke dalam indikator kuantitatif. Proses pengukurannya diawali dengan menghitung masing-masing indeks dimensi, yang kemudian distandarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum. Selanjutnya, indeks-indeks tersebut digabungkan untuk memperoleh nilai I-HDI secara keseluruhan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Anto (2009), dengan penyesuaian dari Rafsanjani (2018) dan Suharno

(2019), serta mempertimbangkan ketersediaan data yang relevan sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Setelah mempertimbangkan ketersediaan data yang ada, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Indikator I-HDI yang digunakan

Dimensi	Indikator	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Skala	Acuan/ Ket- eranga n
<i>Hifdz ad-Dien</i>	Jumlah Kejahatan	Nilai Minimal	Nilai Maksi- mal	Per 100.00 0 pendud uk	Data aktual
<i>Hifdz an-Nafs</i>	Angka Harapan Hidup	20	85	Tahun	Standar UNDP
<i>Hifdz al-'Aql</i>	Rata-rata Lama Sekolah	0	15	Tahun	Standar UNDP
	Harapan Lama Sekolah	0	18	Tahun	Standar UNDP
<i>Hifdz an-Nasl</i>	Jumlah Perceraian	Nilai Minimal	Nilai Maksi- mal	Per 1.000 pendud uk	Data aktual
<i>Hifdz al-Mal</i>	Pengeluaran Perkapita	ln (1.007.000)	ln (26.572.000)	Ribu Rupiah	Standar BPS
	Gini Ratio	Nilai Minimal	Nilai Maksi- mal	Indeks	Data aktual

Sumber: Di olah penulis, 2026

I-HDI dihitung dengan terlebih dahulu menghitung indeks dari setiap indikator yang mewakili lima dimensi maqashid syariah. Nilai maksimum dan nilai minimum dari beberapa indikator I-HDI telah sesuai dengan standar, baik standar internasional maupun standar nasional. Beberapa indikator yang telah menggunakan standar internasional UNDP yaitu: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indikator yang menggunakan standar nasional perhitungan BPS yaitu pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Sementara itu, indikator yang belum memiliki standar, baik standar internasional maupun standar nasional yaitu: jumlah kejahatan, jumlah perceraian dan gini ratio digunakan nilai terendah (*min*) dan nilai tertinggi (*max*) dari setiap masing masing komponen I-HDI. Selanjutnya, metode *Min-Max Scaling* digunakan untuk mentransformasikan nilai asli dari masing-masing indikator yang telah ditentukan ke dalam skala nilai (0-1). Formula normalisasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Keterangan:

X : Nilai aktual indikator pada Kabupaten/Kota tahun ke i
X_{min} : Nilai minimum indikator pada Kabupaten/Kota tahun ke

X_{max} : Nilai maksimum indikator pada Kabupaten/Kota tahun ke i

Beberapa dimensi seperti dimensi jiwa, dimensi akal, dan dimensi harta merujuk pada standar nilai maksimum dan nilai minimum yang ditetapkan oleh UNDP dan nasional. Berikut ini adalah penjelasan mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Indeks *ad-Dien* (Agama)

Indeks agama diukur menggunakan indikator jumlah kejahatan per 100.000 penduduk sebagai cerminan dari penjagaan agama (*Hifdz ad-Din*) maupun pengabaian terhadap nilai-nilai agama (*Tark ad-Din*). Indikator ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai agama berkontribusi pada pembentukan moral dan ketertiban sosial. Tingginya tingkat kejahatan dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam moral dan ketertiban sosial yang berpotensi mencerminkan lemahnya pengamalan nilai-nilai agama, sedangkan rendahnya tingkat kejahatan menunjukkan kondisi sosial yang lebih aman dan tertib. (Rukiah *et al.*, 2019). Dengan demikian, jumlah kejahatan dapat digunakan sebagai proksi negatif *Hifdz ad-Din*, sehingga semakin rendah tingkat kejahatan, semakin baik tingkat penjagaan agama yang direpresentasikan oleh indikator tersebut.. Rumus indeks agama adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } ad\text{-Dien (ID)} = \frac{\text{Actual KJHT} - \text{Minimal KJHT}}{\text{Maximal KJHT} - \text{Minimal KJHT}}$$

b. Indeks *an-Nafs* (Jiwa)

Indikator angka harapan hidup digunakan sebagai ukuran terhadap penjagaan jiwa (*Hifdz an-Nafs*). Indikator tersebut tidak hanya mencerminkan panjangnya usia penduduk, tetapi juga merefleksikan kondisi kesehatan masyarakat secara umum, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, sanitasi dan kualitas lingkungan (Priyatno *et al.*, 2023). Oleh karena itu, semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah, semakin besar peluang penduduk untuk menjalani kehidupan yang sehat dan berumur panjang, sehingga dapat mencerminkan semakin baiknya upaya perlindungan terhadap jiwa. UNDP juga menggunakan angka harapan hidup sebagai salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga indikator ini sejalan dengan standar pengukuran pembangunan baik secara nasional maupun internasional. Rumus untuk indeks jiwa adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } an\text{-}Nafs \text{ (INF)} = \frac{\text{Actual AHH} - \text{Minimal AHH}}{\text{Maximal AHH} - \text{Minimal AHH}}$$

c. Indeks *al-'Aql* (Akal)

Indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah digunakan dalam mengukur indeks akal karena keduanya merepresentasikan upaya pemeliharaan dan pengembangan kapasitas intelektual manusia melalui

pendidikan. Rata-rata lama mencerminkan capaian aktual pendidikan penduduk karena menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk dewasa. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar akumulasi pengetahuan dan pengalaman pendidikan yang dimiliki masyarakat, sehingga indikator ini dapat menggambarkan kondisi kualitas sumber daya manusia dan perkembangan kapasitas intelektual suatu wilayah. Sementara itu, harapan lama sekolah menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia masuk sekolah berdasarkan pola partisipasi pendidikan yang berlaku (Amal *et al.*, 2024). Dengan demikian, harapan lama sekolah dapat mencerminkan peluang serta potensi pengembangan kualitas intelektual masyarakat pada masa mendatang.

Penggunaan kedua indikator tersebut secara bersamaan menjadikan pengukuran *Hifdz al-'Aql* lebih komprehensif karena RLS menggambarkan capaian pendidikan aktual, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan potensi keberlanjutan pengembangan pendidikan dan intelektualitas generasi mendatang. Selain itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sejalan dengan standar pengukuran pembangunan manusia yang digunakan UNDP dalam mengukur dimensi pengetahuan,

sehingga relevan secara konseptual dan empiris sebagai indikator proksi dalam mengukur pemeliharaan akal. Rumus indeks akal dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata Lama Sekolah (RLS)} = \frac{\text{Actual RLS}-0}{15-0}$$

$$\text{Harapan Lama Sekolah (HLS)} = \frac{\text{Actual HLS}-0}{18-0}$$

$$\text{Indeks al-'Aql (IA)} = \frac{1}{2} (\text{RLS}) + \frac{1}{2} (\text{HLS})$$

d. Indeks *an-Nasl* (Keturunan)

Indeks keturunan diukur menggunakan jumlah perceraian per 1.000 penduduk. jumlah perceraian digunakan sebagai indikator yang merepresentasikan stabilitas dan ketahanan keluarga. Tingginya angka perceraian dapat mencerminkan rendahnya stabilitas rumah tangga yang berpotensi memengaruhi kondisi pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus (Rama, 2019). Oleh karena itu, semakin rendah tingkat perceraian, semakin baik kondisi ketahanan keluarga yang dapat mendukung tercapainya *Hifdz an-Nasl*. Rumus indeks keturunan dengan indikator jumlah pernikahan dan jumlah perceraian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks an-Nasl (INS)} = \frac{\text{Actual RC}-\text{Minimal RC}}{\text{Maximal RC}-\text{Minimal RC}}$$

e. Indeks *al-Mal* (Harta)

Indeks harta diukur menggunakan dua indikator, yaitu pengeluaran perkapita dan gini rasio. Dalam hal ini, Pengeluaran per kapita merepresentasikan rata-rata kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, sehingga semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin besar kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pemeliharaan harta tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan kekayaan, tetapi juga pemanfaatan harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan (*falah*) (Rama, 2019). Sementara itu, Gini Ratio digunakan untuk menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan; semakin rendah ketimpangan pendapatan, semakin merata kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kedua indikator tersebut saling melengkapi dalam merepresentasikan *Hifdz al-Mal*, yaitu melalui kemampuan ekonomi masyarakat dan pemerataan distribusi harta (Setiawan *et al.*, 2021). Rumus indeks harta dengan indikator pengeluaran per kapita dan indeks kedalaman kemiskinan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pengeluaran Perkapita (PP)

$$= \frac{\ln(\text{Actual PP}) - \ln(\text{Maximal PP})}{\ln(\text{Maximal PP}) - \ln(\text{Minimal PP})}$$

$$\text{Gini Rasio (GR)} = \frac{\text{Actual GR} - \text{Minimal GR}}{\text{Maximal GR} - \text{Minimal GR}}$$

$$\text{Indeks al-Mal (IM)} = \frac{1}{2} (\text{PP}) + \frac{1}{2} (\text{GR})$$

Dari perhitungan rumus pembentuk I-HDI tersebut, nilai indeks pada setiap dimensi selanjutnya dihitung menggunakan metode rata-rata sederhana (*Simple Aggregative Method*). Metode ini digunakan dengan asumsi bahwa setiap dimensi maqashid syariah memiliki tingkat kepentingan yang sama, sehingga seluruh dimensi diberikan bobot yang setara dalam pembentukan indeks komposit I-HDI. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung I-HDI adalah sebagai berikut:

$$\text{I-HDI} = \frac{2}{5} (\text{ID}) + \frac{1}{5} (\text{INF} + \text{IA} + \text{INS} + \text{IM})$$

3. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat dalam penelitian ini merupakan variabel independen yang menggambarkan jumlah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik oleh lembaga pengelola zakat di Provinsi Aceh. Penyaluran zakat mencerminkan distribusi dana zakat yang dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, penyaluran zakat diukur berdasarkan total dana zakat yang disalurkan pada masing-masing kabupaten/kota Provinsi Aceh selama

periode 2020-2024. Data diperoleh dari Baitul Mal Aceh dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam penelitian ini merupakan variabel independen yang digunakan untuk menggambarkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. TPT menunjukkan kondisi penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Dalam penelitian ini, TPT digunakan untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja pada masing-masing kabupaten/kota Provinsi Aceh selama periode 2020-2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dinyatakan dalam satuan persen (%).

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

N o	Variabel	Definisi Operasio nal Variabel	Indikator	Satu an	Sumber Data
1	Kemiskinan (Y)	Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan	Persentase Penduduk Miskin pada tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2020-2024	Per- sen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)

		berada di bawah Garis Kemiskinan.			
2	<i>Islamic Human Development Index (X₁)</i>	Indeks pembangunan manusia berdasarkan perspektif maqashid syariah yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui lima dimensi utama, yaitu pemeliharaan agama (<i>Hifdz ad-Dien</i>), jiwa (<i>Hifdz an-Nafs</i>), akal (<i>Hifdz al-'Aql</i>), keturunan (<i>Hifdz an-Nasl</i>), dan	1. Indeks <i>ad-Dien</i> (Rasio Kejahatan) 2. Indeks <i>an-Nafs</i> (Angka Harapan Hidup) 3. Indeks <i>al-'Aql</i> (Rata-rata Lama Sekolah dan 4. Harapan Lama Sekolah) 5. Indeks <i>an-Nasl</i> (Rasio Perceraian) 6. Indeks <i>al-Mal</i> (Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan dan Gini Rasio) Pada tingkat Kabupaten/ Kota	Indeks (0–1)	Data BPS dan hasil perhitungan peneliti

Tabel 3.2-lanjutan

		harta (<i>Hifdz al-Mal</i>). Nilai I-HDI diperoleh dari hasil agregasi indeks pada masing-masing dimensi menggunakan metode min-max scaling.	Provinsi Aceh Periode 2020-2024		
3	Penyaluran Zakat (X_2)	Jumlah dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam	Total realisasi penyaluran zakat pada tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Periode 2020-2024	Rupiah (Rp)	Baitul Mal Aceh/BAZNAS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tingkat	Persen (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 3.2-lanjutan

		kerja, bekerja.menc akup penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapk an usaha, atau merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan.	Kabupaten/K ota Provinsi Aceh Periode 2020-2024		
--	--	---	--	--	--

Sumber: di olah penulis, 2026

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *cross-section* (jumlah unit) dan data *time-series* (runtun waktu). Data *cross-section* dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota, sedangkan data *time-series* adalah data yang diambil dari suatu periode waktu yaitu periode 2020-2024. Menurut Napitupulu *et al.* (2021) regresi data panel memiliki keunggulan dalam mengakomodasi heterogenitas antar unit analisis, sekaligus meningkatkan derajat bebas (*degree of freedom*) yang membuat estimasi lebih efisien.

Dalam analisis regresi data panel, *missing value* (data kosong) dapat menyebabkan struktur data menjadi *unbalanced panel* dan mengurangi jumlah observasi yang dapat digunakan dalam estimasi. Untuk mempertahankan kelengkapan dan keseimbangan panel, data yang kosong dilengkapi menggunakan interpolasi linier sederhana berbasis deret waktu pada masing-masing kabupaten/kota. Interpolasi merupakan teknik estimasi untuk memperkirakan nilai yang hilang berdasarkan nilai observasi yang tersedia di antara periode yang diketahui (Baltagi, 2021). Adapun model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$MSK_{it} = \alpha + \beta_1 IHDI_{it} + \beta_2 ZKT_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- MSK_{it} : kemiskinan kabupaten/kota i pada tahun t
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi variabel independen
- IHDI_{it} : *Islamic Human Development Index*
- ZKT_{it} : Penyaluran zakat
- TPT_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka
- i : kabupaten/kota
- t : periode
- ε_{it} : *Error term* (variabel gangguan/residu)

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif termasuk salah satu pendekatan statistik yang digunakan untuk menyuguhkan untuk gambaran atau karakteristik dasar dari suatu data yang menggabungkan antara deret waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*). Statistik deskriptif menyajikan ukuran ringkasan seperti nilai mean, standar deviation, minimum dan maximum dari setiap variabel penelitian (Ghozali, 2021).

3.6.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga pendekatan model yang dapat digunakan, yaitu:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data *cross-section* dan *time-series* tanpa memperhatikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu. Model ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar wilayah adalah sama dalam berbagai kurun waktu. Estimasi parameter pada model ini menggunakan pendekatan kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Model ini diformulasikan sebagai berikut:

$$MSK_{it} = \alpha + \beta_1 IHDI_{it} + \beta_2 ZKT_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

MSK_{it} : kemiskinan kabupaten/kota i pada tahun t

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien regresi variabel independen
$IHDI_{it}$	: <i>Islamic Human Development Index</i>
ZKT_{it}	: Penyaluran zakat
TPT_{it}	: Tingkat Pengangguran Terbuka
i	: kabupaten/kota
t	: periode
ε_{it}	: <i>Error term</i> (variabel gangguan/residu)

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep antar individu, namun intersep tersebut tetap antar waktu. Model ini mengakui adanya karakteristik unik dari setiap subjek penelitian yang tidak berubah selama periode pengamatan. Perbedaan antar individu tersebut ditangkap melalui penggunaan variabel boneka (*dummy variable*). Formulasi model FEM adalah sebagai berikut:

$$MSK_{it} = \alpha_i + \beta_1 IHDI_{it} + \beta_2 ZKT_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \varepsilon_{it}$$

keterangan:

MSK_{it}	: kemiskinan kabupaten/kota i pada tahun t
α_i	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien regresi variabel independen
$IHDI_{it}$	: <i>Islamic Human Development Index</i>
ZKT_{it}	: Penyaluran zakat
TPT_{it}	: Tingkat Pengangguran Terbuka
i	: kabupaten/kota

t : periode

ε_{it} : *Error term* (variabel gangguan/residu)

3. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model (REM) mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antar individu dan waktu tercermin melalui error atau gangguan (stokastik) dan bersifat acak. Berbeda dengan FEM yang menggunakan variabel dummy, REM menggunakan komponen error untuk menangkap perbedaan antar observasi, sehingga model ini dianggap lebih efisien dalam hal derajat bebas (*degree of freedom*). Model ini diestimasi menggunakan metode *Generalized Least Square (GLS)* dan diformulasikan sebagai berikut:

$$MSK_{it} = \alpha + \beta_1 IHD I_{it} + \beta_2 ZKT_{it} + \beta_3 TPT_{it} + (\mu_i + \varepsilon_{it})$$

Keterangan :

MSK_{it} : kemiskinan kabupaten/kota i pada tahun t

α_i : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi variabel independen

$IHDI_{it}$: *Islamic Human Development Index*

ZKT_{it} : Penyaluran zakat

TPT_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka

i : kabupaten/kota

t : periode

μ_i : *Error* spesifik kabupaten/kota

ε_{it} : *Error term* (variabel gangguan/residu)

3.6.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Ketentuan pemilihan *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect Model* di tentukan dengan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *laugrange multiplier*:

1. Uji *Chow*

Uji *chow* bertujuan untuk menentukan model uji yang lebih sesuai *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *F-statistic* (*Redundant Fixed Effects Test*) dengan asumsi hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common effect model* (CEM)

H_1 : *Fixed effect model* (FEM)

Bila nilai Prob > 0.05 (H_0 diterima) maka menggunakan *Common Effect Model* (CEM) dan bila nilai Prob < 0.05 (H_0 ditolak) maka menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

2. Uji *Hausman*

Uji *hausman* bertujuan untuk mengidentifikasi model yang paling tepat digunakan, antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dengan asumsi hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effects Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effects Model* (FEM)

Bila nilai Prob > 0,05 (H_0 diterima), sehingga mempergunakan *Random Effect Model* (REM) dan bila nilai

Prob < 0,05 (H_0 ditolak), sehingga mempergunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

3. Uji LM (*Lagrange Multiplier*)

Uji *lagrange multiplier* bertujuan untuk menentukan apakah model *Random Effect Model* (REM) lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect Model* (CEM). Pengujian ini didasarkan pada nilai signifikansi dari metode *Breusch-Pagan*. Hipotesis dan kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Random Effect Model* (REM)

Bila nilai Prob > 0,05 (H_0 diterima), sehingga mempergunakan *Common Effect Model* (CEM) dan bila nilai Prob < 0,05 (H_0 ditolak), sehingga mempergunakan *Random Effect Model* (REM).

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menentukan ketepatan model dan mengetahui apakah data-data yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variabel bebas (independen). Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolonieritas menggunakan Matriks Korelasi (*Pearson Correlation Matrix*). Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas yaitu:

- a. Jika nilai koefisien korelasi antara sesama variabel independen $< 0,80$, maka tidak terdapat model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.
- b. Jika nilai koefisien korelasi antara sesama variabel independen $> 0,80$ menunjukkan bahwa terdapat masalah serius terkait multikolinearitas dalam model.

2. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data atau *residual* (nilai sisa) memiliki distribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *p-value jarque-bera*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu:

- a. Jika *p-value* $< 0,05$, maka residual tidak berdistribusi normal
- b. Jika *p-value* $> 0,05$, maka residual berdistribusi normal

3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2021) uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara *residual* pada periode

t dengan *residual* pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi dalam regresi panel adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi *Durbin-Watson* (DW) yaitu:

- a. Jika $DW < dL$ atau $DW > 4 - dL$, maka terdapat autokorelasi
- b. Jika $dU < DW < 4 - dU$, maka tidak terdapat autokorelasi
- c. Jika $dL \leq DW \leq dU$ atau $4 - dU \leq DW \leq 4 - dL$, maka hasil berada pada daerah ragu-ragu sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan yang pasti.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ditentukan melalui uji *Glejser* dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai *Absolute Residual* (ABSRES). Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu:

- a. Jika $p\text{-value} < 0,05$, maka model mengalami heteroskedastisitas.
- b. Jika $p\text{-value} > 0,05$, maka model memenuhi asumsi homoskedastisitas

3.6.5 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji - t)

Menurut Ghazali (2021), Uji - t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi ($Prob < 0,05$), maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- a. Jika nilai $Prob > 0,05$ maka H_0 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $Prob < 0,05$ maka H_1 diterima, dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji - f)

Menurut Ghazali (2021), uji - f memiliki tujuan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

- a. Jika nilai $Prob. F-statistic > 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.
- b. Jika nilai $Prob. F-statistic < 0,05$ maka H_1 diterima, sehingga secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu, nilai yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai mendekati satu berarti hampir semua informasi yang diberikan oleh variabel independent diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Provinsi Aceh terletak pada posisi wilayah ujung bagian barat Pulau Sumatera dan menjadi wilayah paling barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara geografis Provinsi Aceh terletak pada 2°-6° Lintang Utara dan 95°-98° Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Gambar 4.1
Peta Provinsi Aceh



Provinsi Aceh beribu kota di Kota Banda Aceh, yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, serta pusat aktivitas sosial dan budaya masyarakat Aceh. Provinsi Aceh memiliki 18 Kabupaten dan 5 Kota, 290 kecamatan dan 6.516 gampong (desa/kelurahan) yang tersebar diseluruh wilayah Aceh. Dari sisi luas wilayah, Provinsi Aceh memiliki luas sekitar 57.956 km² yang mencakup wilayah daratan dan perairan. Luas wilayah tersebut menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Sumatera.

Tabel 4.1

Ibu Kota dan Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km ²)
1	Simeulue	Sinabang	2.051,48
2	Aceh singkil	Singkil	2.185,00
3	Aceh selatan	Tapak Tuan	3.841,60
4	Aceh tenggara	Kutacane	4.231,43
5	Aceh timur	Idi Rayeuk	6.286,01
6	Aceh tengah	Takengon	4.318,39
7	Aceh barat	Meulaboh	2.927,95
8	Aceh besar	Kota Jantho	2.969,00
9	Pidie	Sigli	3.086,95
10	Bireuen	Bireuen	1.901,20
11	Aceh utara	Lhoksukon	3.236,86
12	Aceh barat daya	Blangpidie	1.490,60
13	Gayo lues	Blang Kejeren	5.719,58
14	Aceh tamiang	Karang Baru	1.956,72
15	Nagan raya	Suka Makmue	3.363,72
16	Aceh jaya	Calang	3.812,99
17	Bener meriah	Simpang Tiga Redelong	1.454,09
18	Pidie jaya	Meureudu	1.073,60
19	Banda aceh	Banda Aceh	61,36
20	Sabang	Sabang	153,00
21	Langsa	Langsa	262,41
22	Lhokseumawe	Lhokseumawe	181,06
23	Subulussalam	Subulussalam	1.391,00

Sumber: Di olah penulis, 2026

4.2 Statistik Deskriptif Data Penelitian

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi sekilas tentang karakteristik data penelitian selama periode pengamatan tahun 2020–2024 pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk mengetahui nilai *mean*, *maximum*, *minimum*, *standar deviasi* dan besaran observasi penelitian sebagai dasar awal untuk memahami kondisi variabel penelitian sebelum dilakukan analisis regresi data panel dan pengujian hipotesis lebih lanjut. Berdasarkan hasil data olah menggunakan Eviews 10 didapat nilai statistik deskriptif variabel Tingkat Kemiskinan, *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai berikut:

Tabel 4.2
Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	Tingkat Kemiskinan (%) (Y)	<i>Islamic Human Development Index</i> (Indeks 0-1) (X1)	Log(Zakat/kapita) (X2)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (X3)
Mean	15.09	0.53	4.26	5.76
Median	15.08	0.50	4.37	5.75
Maximum	20.36	0.96	4.89	11.99
Minimum	6.90	0.40	1.34	1.24
Std. Dev.	3.30	0.10	0.55	2.14
Observations	115	115	115	115

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 10, 2026.

4.2.1 Tingkat Kemiskinan (Y)

Tingkat kemiskinan merupakan variabel *dependen* yang digunakan dalam penelitian ini, pengukuran tingkat kemiskinan menggunakan persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan tabel 4.2 tingkat kemiskinan tahun 2020-2024 dengan jumlah 115 observasi diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,09 persen. Nilai tingkat kemiskinan tertinggi (*maximum*) sebesar 20,36 persen sedangkan tingkat kemiskinan terendah sebesar 6,90 persen. Nilai standar deviasi pada tingkat kemiskinan sebesar 3,30 menunjukkan bahwa variasi tingkat kemiskinan yang cukup besar antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode penelitian. Berikut data tingkat kemiskinan kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2020-2024.

Tabel 4.3
Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	18.49	18.98	18.37	17.92	17.69
Aceh Singkil	20.20	20.36	19.18	19.15	19.06
Aceh Selatan	12.87	13.18	12.43	12.10	12.02
Aceh Tenggara	13.21	13.41	12.83	12.45	11.99
Aceh Timur	14.08	14.45	13.91	13.39	13.26
Aceh Tengah	15.08	15.26	14.50	14.38	14.27
Aceh Barat	18.34	18.81	17.93	17.86	17.60
Aceh Besar	13.84	14.05	13.38	13.38	13.21
Pidie	19.23	19.59	18.79	18.78	18.59
Bireuen	13.06	13.25	12.51	12.12	12.10

Tabel 4.3 Lanjutan

Aceh Utara	17.02	17.43	16.86	16.64	16.11
Aceh Barat Daya	15.93	16.34	15.44	15.43	15.32
Gayo Lues	19.32	19.64	18.87	18.82	18.30
Aceh Tamiang	13.08	13.34	12.61	12.51	12.17
Nagan raya	17.70	18.23	17.38	17.25	16.94
Aceh Jaya	12.87	13.23	12.51	12.42	12.25
Bener Meriah	18.89	19.16	18.39	18.31	18.18
Pidie Jaya	19.19	19.55	18.45	18.40	18.28
Banda Aceh	6.90	7.61	7.13	7.04	6.95
Sabang	14.94	15.32	14.66	14.59	14.58
Langsa	10.44	10.96	10.62	10.53	10.33
Lhokseumawe	10.80	11.16	10.84	10.73	10.44
Subulussalam	17.60	17.65	16.94	16.41	16.38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan kabupaten/kota provinsi Aceh dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi (*maximum*) adalah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2021, dimana angka kemiskinan sebesar 20,36 persen dan mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2024 dengan tingkat kemiskinan sebesar 19,06%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil masih tergolong tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.

Di sisi lain, kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah (*minimum*) adalah Kota Banda Aceh pada tahun 2020, dimana tingkat kemiskinan sebesar 6,90% dan mengalami kenaikan

pada tahun 2021 menjadi 7,61% serta turun kembali hingga tahun 2024 menjadi 6,95%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh cenderung lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh selama periode penelitian yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

4.2.2 *Islamic Human Development Index (I-HDI) (X1)*

Islamic Human Development Index (I-HDI) merupakan variabel *independen* yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai I-HDI diperoleh dari pengukuran lima dimensi maqashid syariah, yaitu *Hifdz ad-Dien*, *Hifdz an-Nafs*, *Hifdz al-'Aql*, *Hifdz an-Nasl*, dan *Hifdz al-Mal*, yang dinyatakan dalam skala indeks 0–1. Berdasarkan tabel 4.2, nilai rata-rata (*mean*) I-HDI kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2024 sebesar 0,53. Nilai I-HDI tertinggi (*maximum*) sebesar 0,96, sedangkan nilai I-HDI terendah sebesar 0,40. Nilai standar deviasi pada I-HDI sebesar 0,10, menunjukkan bahwa penyebaran nilai I-HDI antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode pengamatan cenderung rendah. Berikut data I-HDI kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2020-2024.

Tabel 4.4
Data Islamic Human Development Index (I-HDI)
Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	0.44	0.46	0.62	0.50	0.45
Aceh Singkil	0.44	0.50	0.49	0.52	0.52
Aceh Selatan	0.42	0.45	0.50	0.47	0.48
Aceh Tenggara	0.51	0.54	0.60	0.57	0.55
Aceh Timur	0.44	0.45	0.49	0.47	0.50
Aceh Tengah	0.53	0.53	0.52	0.53	0.54
Aceh Barat	0.50	0.50	0.52	0.48	0.53
Aceh Besar	0.47	0.47	0.51	0.50	0.51
Pidie	0.43	0.43	0.44	0.44	0.49
Bireuen	0.49	0.50	0.52	0.53	0.53
Aceh Utara	0.44	0.46	0.42	0.48	0.48
Aceh Barat Daya	0.40	0.46	0.45	0.46	0.49
Gayo Lues	0.45	0.45	0.60	0.45	0.47
Aceh Tamiang	0.48	0.51	0.58	0.60	0.57
Nagan raya	0.45	0.46	0.52	0.44	0.50
Aceh Jaya	0.46	0.48	0.64	0.48	0.49
Bener Meriah	0.45	0.50	0.50	0.50	0.51
Pidie Jaya	0.44	0.46	0.51	0.48	0.52
Banda Aceh	0.73	0.77	0.80	0.96	0.95
Sabang	0.52	0.53	0.55	0.62	0.63
Langsa	0.60	0.64	0.66	0.68	0.67
Lhokseumawe	0.67	0.67	0.69	0.67	0.67
Subulussalam	0.48	0.50	0.69	0.61	0.57

Sumber: Data di olah penulis, 2026

Berdasarkan tabel 4.4, menunjukkan bahwa nilai I-HDI kabupaten/kota provinsi Aceh selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Kabupaten/kota dengan nilai I-HDI tertinggi (*maximum*) adalah Kota Banda Aceh pada tahun 2023, dimana nilai I-HDI sebesar 0,96 dan mengalami penurunan pada tahun 2024

dengan nilai I-HDI sebesar 0,95. Meskipun demikian, nilai I-HDI Kota Banda Aceh tetap berada pada kategori sangat tinggi, menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki tingkat pembangunan manusia berbasis Islam yang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh selama periode penelitian.

Sementara itu, kabupaten/kota dengan nilai I-HDI terendah (*minimum*) adalah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2020, dimana nilai I-HDI sebesar 0,40. Pada tahun-tahun selanjutnya, nilai I-HDI Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 0,49 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan pencapaian dimensi pembangunan manusia berbasis maqashid syariah di Kabupaten Aceh Barat Daya selama periode penelitian.

4.2.3 Penyaluran Zakat (X2)

Penyaluran zakat merupakan variabel *independen* yang digunakan dalam penelitian ini, pengukuran penyaluran zakat menggunakan nilai zakat per kapita yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma $\text{Log}(\text{Zakat/Kapita})$ pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan tabel 4.2, nilai rata-rata (*mean*) penyaluran zakat kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2024 sebesar 4,26. Penyaluran zakat tertinggi (*maximum*) sebesar 4,89, sedangkan penyaluran zakat terendah sebesar 1,34. Sementara itu, nilai standar deviasi pada penyaluran zakat sebesar 0,55 menunjukkan bahwa variasi penyaluran zakat antar kabupaten/kota berada pada tingkat sedang, sehingga terdapat perbedaan realisasi penyaluran zakat di setiap daerah selama periode penelitian. Berikut

data penyaluran zakat kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2020-2024.

Tabel 4.5
Data Penyaluran Zakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	4.51	4.54	4.83	4.45	4.61
Aceh Singkil	4.17	4.19	4.29	4.06	4.06
Aceh Selatan	4.48	4.36	4.45	4.37	4.37
Aceh Tenggara	4.43	4.46	4.04	4.36	4.53
Aceh Timur	4.06	4.09	4.33	4.39*	4.44
Aceh Tengah	4.59	4.59	3.35	4.03	4.71
Aceh Barat	4.73	4.76	4.63	1.34	4.20
Aceh Besar	4.56	4.59	3.68	4.41	4.38
Pidie	3.10	3.12	4.15	3.89*	3.14
Bireuen	4.22	4.02	3.91	4.06	4.13
Aceh Utara	4.40	4.42	3.64	4.58	3.97
Aceh Barat Daya	4.71	4.74	4.06	3.84*	3.39
Gayo Lues	4.67	4.70	4.45*	3.90	3.75
Aceh Tamiang	4.44	4.47	4.13	4.23*	4.31
Nagan raya	4.52	4.54	4.31	4.32	4.19
Aceh Jaya	4.58	4.78	4.71	4.62	4.66
Bener Meriah	4.75	4.76	3.85	4.67	4.69
Pidie Jaya	4.20	4.22	3.92	1.48	3.74
Banda Aceh	4.77	4.80	4.48	4.82	4.37
Sabang	4.89	4.81	4.43	4.86	4.23
Langsa	4.16	4.18	4.43*	4.08	3.13
Lhokseumawe	4.86	4.89	4.02	4.33	4.44
Subulussalam	4.62	4.64	4.36*	3.53	4.18

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2026

Keterangan Data:

* :Interpolasi

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai penyaluran zakat kabupaten/kota provinsi Aceh selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Kabupaten/kota dengan penyaluran zakat tertinggi (*maximum*) adalah Kota Lhokseumawe pada tahun 2021

dengan nilai sebesar 4,89. Pada tahun 2022, nilai penyaluran zakat di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 4,02, kemudian kembali mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 4,44 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi penyaluran zakat di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami perubahan selama periode penelitian.

Sementara itu, kabupaten/kota dengan nilai penyaluran zakat terendah (*minimum*) adalah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023, dimana nilai penyaluran zakat sebesar 1,34. Pada tahun selanjutnya, nilai penyaluran zakat Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan hingga mencapai 4,20 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya terdapat peningkatan penyaluran zakat pada Kabupaten Aceh Barat selama periode pengamatan.

4.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X3)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan variabel *independen* yang digunakan dalam penelitian ini, pengukuran TPT menggunakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan tabel 4.2, nilai rata-rata (*mean*) TPT kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2024 sebesar 5,76 persen. Nilai TPT tertinggi (*maximum*) sebesar 11,99 persen, sedangkan nilai TPT terendah sebesar 1,24 persen. Sementara itu, nilai standar deviasi pada TPT sebesar 2,14 menunjukkan bahwa variasi TPT antar kabupaten/kota berada pada tingkat sedang, sehingga terdapat perbedaan tingkat pengangguran terbuka antar daerah selama

periode penelitian. Berikut data TPT kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2020-2024.

Tabel 4.6
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota
Di Provinsi Aceh
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	5.47	5.71	6.00	5.85	5.50
Aceh Singkil	8.24	8.36	6.88	6.84	6.44
Aceh Selatan	6.54	6.46	4.82	4.73	4.56
Aceh Tenggara	5.72	6.43	5.09	5.00	4.79
Aceh Timur	7.26	7.13	8.07	8.03	7.75
Aceh Tengah	3.05	2.61	4.44	4.42	4.21
Aceh Barat	7.30	7.09	6.09	6.07	5.58
Aceh Besar	7.62	7.70	8.28	8.17	7.93
Pidie	6.45	7.28	5.94	5.92	5.74
Bireuen	4.12	4.32	4.20	4.14	3.93
Aceh Utara	8.56	8.31	7.08	7.07	6.88
Aceh Barat Daya	3.93	4.04	4.12	4.08	3.83
Gayo Lues	2.01	1.84	2.70	2.65	2.40
Aceh Tamiang	7.97	5.87	7.38	7.21	6.95
Nagan raya	5.11	4.99	5.84	5.74	5.22
Aceh Jaya	4.08	3.47	3.12	2.88	2.75
Bener Meriah	1.35	1.24	2.61	2.45	2.20
Pidie Jaya	6.58	3.57	4.40	4.34	3.82
Banda Aceh	9.54	8.94	8.62	8.03	7.55
Sabang	4.81	3.56	4.01	3.92	2.95
Langsa	9.75	7.21	7.85	7.73	7.34
Lhokseumawe	11.99	11.16	9.15	8.78	8.47
Subulussalam	6.93	6.26	5.75	5.69	5.12

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan Tabel 4.6, tingkat Tingkat Pengangguran Ter- buka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020– 2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Kabupaten/kota dengan nilai TPT tertinggi (*maximum*) adalah Kota Lhokseumawe

pada tahun 2020, dengan nilai sebesar 11,99 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan secara bertahap menjadi 11,16 persen pada tahun 2021, dan mencapai 8,47 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami perbaikan selama periode penelitian, meskipun nilainya masih tergolong tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.

Sementara itu, kabupaten/kota dengan nilai TPT terendah (*minimum*) adalah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2021, dengan nilai sebesar 1,24 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bener Meriah mengalami peningkatan menjadi 2,61 persen pada tahun 2022, kemudian kembali menurun menjadi 2,45 persen pada tahun 2023 dan 2,20 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bener Meriah memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah selama periode pengamatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.

4.3 Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga pendekatan model estimasi, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Penentuan model estimasi terbaik dilakukan melalui Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM). Adapun Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan apabila hasil Uji *Chow* menunjukkan bahwa *Common*

Effect Model (CEM) lebih tepat. Berikut hipotesis pada pengujian masing-masing uji tersebut.

Tabel 4.7
Hipotesis Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM)

Alat Pengujian	Hipotesis	Ketentuan	Keterangan
Uji Chow	H_0 = menggunakan <i>Common Effect Model</i> .	Jika $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i> .
	H_1 = menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> .	Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_1 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	H_0 = menggunakan <i>Random Effect Model</i>	Jika $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>
	H_1 = menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> .	Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_1 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i>
Uji Lagrange Multiplier	H_0 = menggunakan <i>Common Effect Model</i> .	Jika $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>
	H_1 = menggunakan <i>Random Effect Model</i>	Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_1 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>

Sumber: Di olah penulis, 2026

Penentuan model estimasi bertujuan untuk memperoleh model estimasi yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2020-2024 secara tepat.

4.3.1 Uji Chow

Uji *chow* bertujuan untuk menentukan model uji terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Redundant Fixed Effects Test* (*F-statistic*) dengan asumsi hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common effect model* (CEM)

H_1 : *Fixed effect model* (FEM)

Bila nilai Prob > 0.05 (H_0 diterima) maka menggunakan *Common Effect Model* (CEM), bila nilai Prob < 0.05 (H_0 ditolak) maka menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil pengujian data menggunakan Eviews 10 diperoleh hasil Uji Chow sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Chow

Uji Efek	Statistic	df	P-Value
<i>Cross-section F</i>	170.231548	(22,89)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	432.75099	22	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 10, 2026.

Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji *chow* yang membandingkan antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh nilai P-Value sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dari pada *Common Effect Model* (CEM).

4.3.1 Uji Hausman

Uji *hausman* bertujuan untuk mengidentifikasi model yang paling tepat digunakan, antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dengan asumsi hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \text{Random Effects Model (REM)}$

$H_1 : \text{Fixed Effects Model (FEM)}$

Bila nilai Prob > 0,05 (H_0 diterima), sehingga menggunakan *Random Effect Model* (REM), bila nilai Prob < 0,05 (H_0 ditolak), sehingga menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4.9
Hasil Uji *Hausman*

Uji Efek	Chi-Sq. Statistic	df	P-Value
Cross-Section Random Effects	21.339067	3	0.0001

Sumber: Data diolah menggunakan *EViews 10*, 2026.

Berdasarkan tabel 4.9, hasil uji *hausman* yang membandingkan antara *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM) diperoleh nilai P-Value sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dari pada *Random Effect Model* (REM).

Berdasarkan hasil Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Oleh karena itu, Uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak dilakukan, karena pengujian tersebut digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random*

Effect Model (REM) apabila hasil Uji *Chow* menunjukkan bahwa CEM lebih tepat digunakan.

4.4 Estimasi Regresi Data Panel

Estimasi regresi data panel pada *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik berdasarkan pengujian sebelumnya. Model ini digunakan untuk menganalisis pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan. Analisis yang dilakukan meliputi uji t (Parsial), uji f (Simultan) dan koefisien determinan (R^2).

Tabel 4.10
Hasil Estimasi Regresi Data Panel (*Fixed Effects Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.31392	0.765204	20.01287	0.0000
I-HDI (X_1)	-3.299496	0.951342	-3.468254	0.0008
LogZKT/Kapita (X_2)	0.252464	0.084795	2.977365	0.0037
TPT (X_3)	0.077322	0.059722	1.2947	0.1988
R-squared	0.988036			
Adjusted R-squared	0.984675			
F-statistic	293.9975			
Prob(F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson stat	1.550676			

Sumber: Data diolah menggunakan *EViews 10*, 2026.

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) pada Tabel 4.10, diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{MSK}_{it} = 15,31392 - 3,299496 \text{ I-HDI}_{it} + 0,252464$$

$$\text{LogZKT/Kapita}_{it} + 0,077322 \text{ TPT}_{it} + e$$

Keterangan :

MSK_{it} : kemiskinan kabupaten/kota i pada tahun t

IHDI_{it} : *Islamic Human Development Index*

ZKT_{it} : Penyaluran zakat

TPT_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka

i : kabupaten/kota

t : periode

ε_{it} : *Error term* (variabel gangguan/residu)

Persamaan tersebut menunjukkan arah hubungan beserta nilai koefisien antara variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, interpretasi pengaruh masing-masing variabel belum dilakukan secara lebih lanjut, karena model regresi terlebih dahulu perlu melalui uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa hasil estimasi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Validasi terhadap ketepatan hasil estimasi regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam menganalisis pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan perlu memperhatikan terpenuhinya uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi, Uji Multikolinearitas, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian dilakukan melalui nilai VIF, jika nilai VIF di bawah 10 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas (*Pearson Correlation Matrix*)

Variabel	X1	X2	X3
I-HDI (X ₁)	1	0.1544096	0.34975
LogZKT/Kapita (X ₂)	0.15441	1	0.00313
TPT (X ₃)	0.34975	0.0031282	1

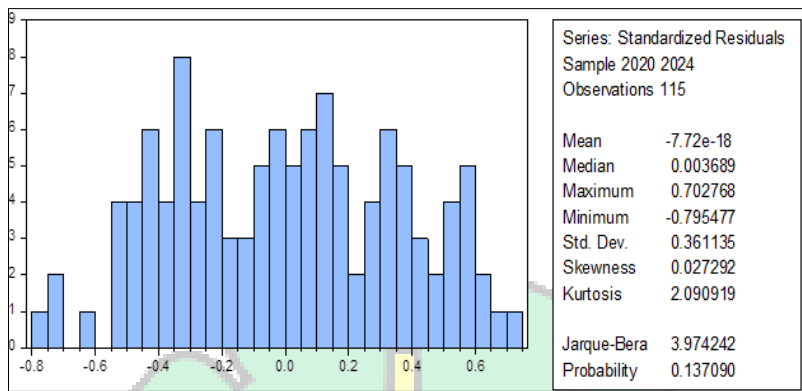
Sumber: Data diolah menggunakan EViews 10, 2026.

Berdasarkan tabel 4.11, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai matriks korelasi setiap variabel independen $< 0,80$, maka dapat disimpulkan model bebas dari gejala multikolonieritas.

4.5.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, data atau *residual* (nilai sisa) memiliki distribusi normal. Pengujian dilakukan melalui nilai *p-value jarque-bera*, Jika *p-value* $> 0,05$, maka *residual* berdistribusi normal.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah menggunakan EViews 10, 2026.

Berdasarkan tabel 4.1, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *p-value jarque-bera* sebesar $0,137 > 0,05$, maka dapat disimpulkan *residual* pada model berdistribusi normal. Sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi.

4.5.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara *residual* pada periode *t* dengan *residual* pada periode *t-1* (sebelumnya) dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai *Durbin-Watson* pada hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi (*Durbin-Watson*)

Durbin-Wat-son stat	d_L	d_U	$d_L - 4$	$d_U - 4$
1.550676	1,6324	1,7452	2,3676	2,2548

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 10, 2026.

Berdasarkan tabel 4.12, hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *Durbin–Watson* sebesar 1,550676. Dengan jumlah observasi 115 dan jumlah variabel independen 3, diperoleh nilai d_L sebesar 1,6324 dan d_U sebesar 1,7452. Dengan demikian nilai DW (1,550676) < d_L (1,6324) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terindikasi mengalami autokorelasi positif.

4.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ditentukan melalui uji *Glejser* dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai *Absolute Residual* (ABSRES). Jika $p\text{-value} < 0,05$, maka model mengalami heteroskedastisitas.

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Absolute Residual*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.554628	0.36639	1.513766	0.1336
I-HDI (X_1)	-0.482368	0.455515	-1.05895	0.2925
LogZKT/Kapita (X_2)	0.073728	0.040601	1.815923	0.0727
TPT (X_3)	-0.053846	0.028596	-1.88302	0.063

Sumber: Data diolah menggunakan *EViews 10*, 2026

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai probabilitas untuk setiap variabel independen > 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Parsial (Uji - t)

Uji parsial atau $ji - t$ dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Hasil uji parsial disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.14
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji - t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.31392	0.765204	20.01287	0.0000
I-HDI (X_1)	-3.299496	0.951342	-3.468254	0.0008
LogZKT/Kapita (X_2)	0.252464	0.084795	2.977365	0.0037
TPT (X_3)	0.077322	0.059722	1.2947	0.1988

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 10, 2026

Berdasarkan tabel 4.14, hasil pengolahan data menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh hasil signifikansi parsial sebagai berikut:

1. Variabel *Islamic Human Development Index* (I-HDI) (X_1) memperoleh p -value sebesar $0,0008 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya I-HDI berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Variabel Penyaluran Zakat (X_2) memperoleh p -value sebesar $0,0037 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya Penyaluran Zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_3) memperoleh *p-value* sebesar $0,1988 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya TPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

4.6.2 Uji Simultan (Uji - f)

Uji simultan atau uji - f memiliki tujuan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.15

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji – f)

F-statistic	293.9975
Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 10, 2026

Berdasarkan tabel 4.15, hasil pengolahan data menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) diperoleh hasil *F-statistic* sebesar 293,9975 dengan nilai *Prob. F-statistic* sebesar $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian variabel *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasdisajikan sebagai berikut

Tabel 4.16

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.988036
Adjusted R-squared	0.984675

Sumber: Data diolah menggunakan EViews 10, 2026

Berdasarkan tabel 4.16, hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0.988036 dengan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.984675. Dengan demikian, 98,47% variasi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024 dapat dijelaskan oleh variabel *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sedangkan sisanya sebesar 1,53% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.7 Analisis Regresi Data panel

Penentuan model estimasi terbaik melalui Uji *Chow* dan Uji *Hausman* menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini. Model tersebut juga telah melalui pengujian asumsi klasik sehingga layak digunakan untuk analisis regresi data panel.

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta untuk melihat arah hubungan, baik positif maupun negatif, dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Kemiskinan, sedangkan variabel independennya adalah *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Persamaan regresi data panel di formulasikan sebagai berikut:

$$MSK_{it} = 15,313 - 3,299 I-HDI_{it} + 0,252 \text{ LogZKT/kapita}_{it} + 0,077 TPT_{it} + e$$

Berdasarkan nilai dari regresi data panel pada persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (C) diperoleh sebesar 15,313 menunjukkan bahwa apabila variabel I-HDI, LogZKT, dan TPT dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat kemiskinan (MSK) diperkirakan sebesar 15,313 persen.
2. Nilai koefisien variabel I-HDI sebesar -3,299 menunjukkan bahwa I-HDI memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, apabila variabel lain diasumsikan tetap maka setiap peningkatan 1 satuan indeks I-HDI akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 3,299 poin persentase.
3. Nilai koefisien variabel LogZKT/kapita sebesar 0,252 menunjukkan bahwa penyaluran zakat perkapita memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, apabila

variabel lain diasumsikan tetap maka setiap peningkatan 1 satuan logaritma penyaluran zakat per kapita akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,252 poin persentase.

4. Nilai koefisien variabel TPT sebesar 0,077 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, apabila variabel lain diasumsikan tetap maka setiap peningkatan 1 persen tingkat pengangguran terbuka dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,077 poin persentase.

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian

4.8.1 Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji signifikansi parsial pada penelitian ini menggunakan *fixed effect model* menunjukkan bahwa *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Aceh tahun 2020-2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar -3,299 dengan $p\text{-value } 0,0008 < 0,05$, dengan demikian penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 , yang artinya I-HDI berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien regresi menunjukkan arah yang berlawanan, mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia yang dibangun berdasarkan 5 dimensi maqashid syariah yaitu *Hifdz ad-Dien*, *Hifdzu an-Nafs*, *Hifdzu an-Nasl* *Hifdzu al-Aql*

dan *Hifdzu al-Maal* cenderung menurunkan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Temuan ini sejalan dengan teori *human capital* yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia merupakan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan individu dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, semakin besar peluang seseorang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Viollani *et al.* (2022) yang menemukan bahwa I-HDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berbasis syariah mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Vinta dan Rosyidah (2023) menyimpulkan bahwa I-HDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, peningkatan pencapaian pembangunan manusia berbasis maqashid syariah dapat memengaruhi upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Temuan yang serupa juga diperoleh Anggraini (2024) yang menunjukkan bahwa I-HDI berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berbasis syariah dapat menjadi instrumen penting dalam pengurangan kemiskinan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian penelitian Nurhalim *et al.* (2022) yang menemukan bahwa I-HDI

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan Maslakhah *et al.* (2024) yang menemukan bahwa I-HDI berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

4.8.2 Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji signifikansi parsial pada penelitian ini menggunakan *fixed effect model* menunjukkan bahwa penyaluran zakat berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Aceh tahun 2020-2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,252 dengan *p-value* $0,0037 < 0,05$, dengan demikian penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 , yang artinya penyaluran zakat berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang searah, mengindikasikan bahwa peningkatan penyaluran zakat belum diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode penelitian.

Secara teori, zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Perbedaan antara hasil penelitian ini dan teori zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan menunjukkan bahwa besarnya penyaluran zakat pada kabupaten/kota belum tentu secara otomatis mencerminkan efektivitas distribusinya dalam menurunkan kemiskinan, karena efektivitas tersebut juga dipengaruhi oleh

ketepatan penyaluran dan kualitas tata kelola zakat pada tingkat kabupaten/kota. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damanhur *et al.* (2022) yang meneliti Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyaluran zakat masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait pendampingan dan pemerataan penerima manfaat, sehingga penyaluran zakat belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara nyata.

Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan dengan penelitian Al Mumtaz dan Supriyono (2023) yang menemukan zakat memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah Periode 2018-2022. Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi zakat, sehingga dana zakat yang disalurkan belum sepenuhnya mampu memberikan dampak yang efektif dalam menurunkan kemiskinan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Muiz *et al.* (2023) yang mengungkapkan bahwa meskipun zakat bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan, hasilnya masih beragam tergantung pada metode implementasi dan efektivitas program yang dijalankan. Sementara itu, Pimada (2024) menyatakan bahwa zakat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Yogyakarta. Hal ini terjadi karena, penyaluran dana zakat kepada mustahik lebih besar diberikan dalam bentuk zakat konsumtif.

Di sisi lain, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Prasojo dan Khorunisa (2020) menemukan bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan serupa diperoleh Nurhalim *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2024) menyimpulkan bahwa penyaluran zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran zakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, Maslakhah *et al.* (2024) menemukan bahwa ZIS memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi, yang menunjukkan bahwa efektivitas zakat dalam menurunkan kemiskinan dapat berbeda-beda pada setiap daerah, tergantung pada kapasitas lembaga pengelola zakat, karakteristik mustahik, serta proporsi penyaluran zakat produktif dan konsumtif yang diterapkan.

4.8.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji signifikansi parsial pada penelitian ini menggunakan *fixed effect model* menunjukkan bahwa TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Aceh tahun 2020-2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,077 dengan *p-value* $0,198 > 0,05$, dengan demikian penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_a , yang artinya

TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien regresi menunjukkan hubungan yang searah, mengindikasikan bahwa peningkatan TPT cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, maka perubahan tingkat pengangguran terbuka belum dapat dibuktikan memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Secara teori, berkurangnya lapangan pekerjaan secara otomatis memutus sumber penghasilan masyarakat dan memicu kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak selalu menjadi penentu utama tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan TPT dapat terjadi karena bertambahnya jumlah pencari kerja terdidik yang sedang menunggu pekerjaan formal. Kelompok ini umumnya masih memiliki dukungan ekonomi dari keluarga atau sumber pendapatan lain sehingga belum secara langsung masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Sebaliknya, masyarakat miskin cenderung tetap bekerja pada sektor informal seperti bertani, berdagang kecil, atau menjadi buruh harian, sehingga mereka tidak tercatat sebagai penganggur terbuka meskipun pendapatannya rendah. Dengan demikian, tinggi-rendahnya tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasojo dan Khorunisa (2020) yang menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif

tidak signifikan terhadap kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran belum tentu secara langsung menyebabkan peningkatan kemiskinan. Penelitian Prasistia dan Entas (2024) juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu pengaruh TPT terhadap kemiskinan relatif kecil dan tidak cukup kuat untuk memberikan dampak yang nyata. Kondisi ini dapat disebabkan karena sebagian dari mereka mungkin masih mendapat dukungan finansial dari keluarga, menerima bantuan sosial, atau terlibat dalam aktivitas ekonomi informal yang tidak tercatat dalam data resmi ketenagakerjaan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Pulungan (2024) yang menyatakan bahwa banyak daerah di Indonesia, sebagian besar pengangguran beralih bekerja di sektor informal sehingga tidak langsung tercatat memengaruhi tingkat kemiskinan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Widiastuti dan Kosasih (2021) yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran akan meningkatkan tingkat kemiskinan karena berkurangnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Vinta dan Rosyidah (2023) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Temuan serupa diperoleh Anggraini (2024) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif

signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.8.4 Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji simultan pada penelitian ini menggunakan *fixed effect model* menunjukkan bahwa *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Aceh tahun 2020-2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *p-value F-statistic* sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 , yang artinya *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI), Penyaluran Zakat, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Aceh. Maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Islamic Human Development Index* (I-HDI) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berbasis *maqashid syariah* mampu menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Penyaluran zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran zakat selama periode penelitian belum diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara nyata,
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran terbuka belum mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara nyata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. kebijakan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh tidak hanya perlu berorientasi pada penurunan angka pengangguran terbuka, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan dan produktivitas masyarakat yang bekerja di sektor informal.
2. Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota diharapkan meningkatkan transparansi dan kualitas penyediaan data penyaluran zakat melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkonstruksi kembali kualitas indikator pengukuran kelima dimensi *maqashid syariah*, terutama indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi *ad-Dien*.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Terdapat beberapa data pada variabel penyaluran zakat di tingkat Kabupaten/Kota untuk periode 2020–2024 yang tidak tersedia secara lengkap (*missing data*) pada sumber data resmi. Dalam mengatasi kekosongan data tersebut dan menjaga keseimbangan data panel (*balanced panel*), peneliti melakukan interpolasi data. Meskipun interpolasi dilakukan

dengan pendekatan matematis yang lazim dalam statistika, nilai hasil interpolasi tersebut merupakan nilai estimasi (pendekatan) dan mungkin tidak mencerminkan fluktuasi riil atau kondisi anomali yang terjadi di lapangan pada tahun-tahun tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, A., & Lutfi, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS), Tingkat Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015–2020. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 159–168. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.540>
- Amal, M. A., Gunawan, D., Choiri, M., & Zaman, A. R. B. (2024). The Impact Of Maqashid Syariah On The Human Development Index (HDI): The Case Of Indonesia. *Journal of Islamic Economic Laws*, 7(2), 109–127. <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6127>
- Al Mumtaz, N., & Supriyono, Y. (2023). Problem Kemiskinan Di Jawa Tengah Dalam Perspektif Zakat dan Belanja Bantuan Sosial. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 4(1), 1–10. <http://ijmus.muhammadiyahsalatiga.org/index>
- Ali Rama, A. R. (2019). Construction of Islamic Human Development Index. *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, 32(1), 43–64. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.3>
- Aliyah, T., & Bahtiar, M. Y. (2025). Pengaruh Bantuan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 05 (Tumangkeng 2019), 491–508. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1184>
- Asy-Shatibi, A. I. (1920). *Al-Muwafaqat fī uṣūl al-shari‘ah*. Matba‘at al-Maktabah al Tijariyah.
- Anggraini, N., Santosa, P. B., & Citaningati, P. R. (2024). Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009-2022). *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam*, 10(03), 3143–3153.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>
- Anto, M. B. H. (2011). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) To Measure Development In OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, 19(2).
<https://ssrn.com/abstract=3158957>.
- Anto, M. H. (2009). Introducing an Islamic Human Development Index (IHDI) To Measure Development In OIC Countries. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*.
- Arifin, N., & Hendriyani, Y. (2022). PDRB, IPM, dan Kemiskinan Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 3(2), 87–103.
- Aryani, L. (2024). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Kasus di Lampung Selatan, Indonesia). *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 15(2), 211–222.
- Aziz, Y., Mansor, F., Waqar, S., & Abdullah, L. (2020). The Nexus Between Zakat And Poverty Reduction, Is The Effective Utilization Of Zakat Necessary For Achieving Sdgs: A Multidimensional Poverty Index Approach. *Asian Social Work and Policy Review*, 14, 235-247.
<https://doi.org/10.1111/aswp.12212>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021*. Badan Pusat Statistik.
<https://share.google/lfZtC2bT8tqePMy1R>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022*. BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/3b084878f782dfa44e0025e0/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2022.html>

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Badan Pusat Statistik. <https://searchengine.web.bps.go.id/filemenu/Booklet-IPM-Metode-Baru.pdf>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164–175. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Springer.
- Budiyanto, R., Putra, M. H. F., Lubis, A. A. H., Wokas, H., & Desmawan, D. (2024). Pengaruh Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Aceh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Aceh. *INFORMATIKA*, 12(2), 332–340.
- Dea, D. P., & Arif, M. (2023). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2017–2021. *Determinasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.23917/determinasi.v1i4.215>
- Doni, A. H., Alfiona, F., Andespa, W., & Al-Amin, A. A. (2023). Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 2(3), 1–10.
- Efendi, B., Nasution, D. P., Rusiadi, & Pratiwi, D. (2024). *Teori Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Tahta Media Group.
- Fadila, R. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>.

- Fitriani, F. (2024). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 1699–1710. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.5202>.
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1), 366–375. <https://doi.org/10.51903/kompak.v17i1.1866>
- Gebel, M., & Gundert, S. (2023). Changes in Income Poverty Risks at the Transition from Unemployment to Employment: Comparing the Short-Term and Medium-Term Effects of Fixed-Term and Permanent Jobs. *Social Indicators Research*, 167, 507-533. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03118-5>.
- Hamdani, N. R., Subakdi, S., Satino, S., Suprima, S., & Hidayatullah, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Pada Warga Pengangkut Sampah Di Kelurahan Gandul Cinere. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 6314–6326. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8585>
- Harahap, C. T. A. (2024). *Analisis Interaksi Penyaluran Zakat Dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Hasan, A. S., Yahya, M., & Hariyanto. (2021). Analisis Pengaruh Zakat, Belanja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 10(2), 187–214.
- Hasbi, M., Munajat, M., & Qoyum, A. (2023). A Conceptual Framework of The Islamic Human Development Index (I-HDI) and its Relationship with Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v7i2.10910>.
- Hasibuan, F. U., & Tarlis, A. (2019). Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan

- Angka Kemiskinan Di Kota Langsa. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(1), 131–145. <https://doi.org/10.24952/masharif.v7i1.1701>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat As An Instrument Of Poverty Reduction In Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Humam, M. S., & Hanif, M. (2024). Islam, Solidaritas Sosial, Praktik Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Pesantren. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(2), 388–405. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i02.1888>
- Jaenudin, M., & Hamdan, A. (2022). Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat. LAZNAS LMI: Pendekatan CIBEST. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(3), 362–378. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>
- Jaya, A. (2022). Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Mencapai *Falah*. *Jurnal Dialogika: Manajemen dan Administrasi*, 4(1), 33–38.
- Karolinska, K., Panjaitan, I., & Simamora, R. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*. <https://doi.org/10.24127/pro.v11i2.9162>
- Lailatul Zannah, Maslahah, M., Maylinda, M., Saputra, M. R., & Ridwan, M. (2024). Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 140–153. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017–2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(1), 82–95

- Maslakhah, Z., Zulgani, & Enggrani, L. (2023). The Influence Of Zakat, Infaq, And Alms, Islamic Human Development Index (I-HDI), And Economic Growth On Poverty In Jambi Province (2018–2022). *International Research Journal of Education and Social Sciences*, 3(6), 114. <https://irjems.org/Volume-3-Issue-6/IRJEMS-V3I6P114.pdf>
- Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 220–229. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>
- Maulana, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 220–229. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1>
- Mawan, D. H. (2022). *Risalah Ramadan: Penjelasan Ringkas Ibadah Amaliah Di Bulan Ramadan*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/41318>
- Muiz, A. N., Aprilian, N., Wulansari, W., Dafi, I. A., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia Periode 2013-2022. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 207–217. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i2.455>
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 846–857. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis: Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS*. Madenatera, 1, 230
- Nasyitha, A. F. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2018) (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

- Nofitiana, S., Huda, S., & Perdana, P. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.4647>
- Novalia, D., Sumantri, R., & Panorma, M. (2020). Pengaruh Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Terhadap Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Tahun 2015–2019. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 132–148.
<https://doi.org/10.31602/iqt.v6i2.3455>
- Nurhalim, A., Mawani, L., & Fitri, R. (2022). Pengaruh Zakat Dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2017–2020. *AL-MUZARA'AH: Journal of Islamic Economics & Finance*, 10(2).
- Nurhayati, Apriyanto, H., Febriani, R. E., Supyarti, A., & Kusumastuti, S. Y. (2024). *Buku Referensi Ekonomi Pembangunan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurlayli, S., & Jumarni, J. (2022). Pengaruh *Islamic Human Development Index* (I-HDI) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011–2020. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 14(2), 114–130.
<https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v14i2.3089>
- Pimada, L. M. (2024). Pengaruh Penyaluran Zakat, PDRB dan Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2016–2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2580–2590.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14577>
- Praja, R., Muchtar, M., & Sihombing, P. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Ecoplan*.
<https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i2.656>

- Prasojo, P., & Khorunisa, I. (2020). The Effect Of Education, Health, Unemployment And Distribution Of Zakat To Poverty In Yogyakarta. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 6(2), 121–136. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v6i2.6229>
- Prawoto, N. (2019). *Pengantar Ekonomi Makro*. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada
- Priyatno, P. D., Yetty, F., Sari, L. P., & Rizulloh, A. Z. (2023). Welfare Analysis Through Human Development Index With Maqasid Sharia Approach. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(2), 165–181. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v4i2.6831>
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024*.
- Putri, R. N., & Shidiqie, J. S. A. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2015-2020. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 220-225. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss2.art9>
- Rachmawati, M. (2020). Kontribusi Sektor UMKM Pada Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(7), 1–13
- Rafsanjani, H. (2018). *Islamic Human Development Index di Indonesia*. UMSurabaya Publishing.
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(7), 1049–1062. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121>
- Rohima, S., & Budiyanto, M. N. (2024). *Fenomena Kemiskinan Perkotaan: Miskin abu-abu*. Unsri Press.
- Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal*

- Agama dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251.
<https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>
- Rossa, A., & Ananda, C. F. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial, Dan Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 3(3), 803–813.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.3.11>
- Sahira, L., & Bintoro, N. S. (2023). Pengaruh Faktor *Human Capital* Pada Pengangguran Golongan Usia Muda Indonesia Tahun 2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 74–86. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.1.7>
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. Oxford University Press.
- Setiawan, A. N., Febriyanti, D., Selinetan, S., Sylvia, S., & Yanty, Y. (2021). Peran Sektor Lapangan Usaha Terhadap PDRB ADHK Kota Jakarta Selatan Tahun 2011–2020. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(6), 478–486.
<https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i6.118>
- Shirazi, N., Md Isa, M., Abdul Kareem, M. A., & Eskandar Shah, M. E. S. (2023). Islamic Human Development Index (I-HDI) And Poverty Reduction In OIC Countries. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 36(1), 71–90.
<https://doi.org/10.4197/Islec.36-1.4>
- Simanjuntak, J. V., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Pengaruh Sanitasi, Air Minum, Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 317–327.
- Sitorus, A. V. Y., & Utami, L. P. (2023). Sektor unggulan dan kemiskinan di Provinsi Aceh. *Bappenas Working Papers*, 6(2), 223–239. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i2.209>.
- Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70–90.
<https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17450>
- Subandi. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (Cetakan ke-4). Alfabeta.

- Suharno. (2019). *Analisis Islamic Human Development Index (I-HDI) Indonesia (Analisis Simultan Data Panel 33 Provinsi Di Indonesia Periode Tahun 2010–2018)* (Tesis, IAIN Salatiga).
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Depok: Raja-wali Pers.
- Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro* (Edisi ke-2). UPP STIM YKPN.
- Suryana, A., Rusmana, F. D., & Arifudin, O. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5571>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>
- Tamimi, K., & Syarbaini, A. M. B. (2023). Analisis Interaksi Dan Kontribusi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Dan Islamic Human Development Index (I-HDI) Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 19(3), 678–688.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13 ed.). Pearson Education Limited.
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020: The next frontier - Human development and the Anthropocene*. UNDP. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020>
- Vinta, E. N., & Rosyidah, N. (2022). Analysis Of The Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth And

Unemployment Rate On Poverty In Indonesia For The 2013–2022 Period. *Proceedings of the 2nd International Conference on Islamic Economics and Business (ICIB)*, 219–229.

- Viollani, K. A., Siswanto, S., & Suprayitno, E. (2022). Pengaruh Islamic Human Development Index Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dengan Pengangguran Sebagai Variabel Intervening. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5233–5244. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1855>
- Wasalmi, W. (2024). Impact of Zakat Distribution Channels on Poverty Alleviation in Indonesia. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i1.128>.
- World Bank. (2020). Poverty And Shared Prosperity 2020: Reversals Of Fortune. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1602-4>
- Yulkarnain Harahab, S. H. (2024). *Hukum Zakat Dan Wakaf*. Sinar Grafika.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Gema Insani Press.
- Qardawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DATA PANEL

Kab/Kota	Tahun	Kemiskinan (Y) (%)	I-HDI (XI)	Zakat (Milyar) (XII)	TPT (XIII) (%)
Simeulue	2020	18.49	0.44	3,000,000,000.00	5.47
Simeulue	2021	18.98	0.46	3,220,500,000.00	5.71
Simeulue	2022	18.37	0.62	6,418,000,000.00	6.00
Simeulue	2023	17.92	0.50	2,741,211,820.00	5.85
Simeulue	2024	17.69	0.45	3,982,130,000.00	5.50
Aceh Singkil	2020	20.20	0.44	1,865,423,000.00	8.24
Aceh Singkil	2021	20.36	0.50	1,990,592,983.00	8.36
Aceh Singkil	2022	19.18	0.49	2,569,968,000.00	6.88
Aceh Singkil	2023	19.15	0.52	1,540,228,000.00	6.84
Aceh Singkil	2024	19.06	0.52	1,565,459,964.00	6.44
Aceh Selatan	2020	12.87	0.42	7,000,000,000.00	6.54
Aceh Selatan	2021	13.18	0.45	5,374,035,832.00	6.46
Aceh Selatan	2022	12.43	0.50	6,644,520,000.00	4.82
Aceh Selatan	2023	12.10	0.47	5,628,756,100.00	4.73
Aceh Selatan	2024	12.02	0.48	5,680,694,567.00	4.56
Aceh Tenggara	2020	13.21	0.51	6,000,000,000.00	5.72
Aceh Tenggara	2021	13.41	0.54	6,402,600,000.00	6.43
Aceh Tenggara	2022	12.83	0.60	2,500,000,000.00	5.09
Aceh Tenggara	2023	12.45	0.57	5,249,999,893.00	5.00
Aceh Tenggara	2024	11.99	0.55	7,999,999,786.00	4.79
Aceh Timur	2020	14.08	0.44	4,904,799,368.00	7.26
Aceh Timur	2021	14.45	0.45	5,233,911,406.00	7.13
Aceh Timur	2022	13.91	0.49	9,185,763,667.00	8.07
Aceh Timur	2023	13.39	0.47		8.03

Aceh Timur	2024	13.26	0.50	12,337,200,000.00	7.75
Aceh Tengah	2020	15.08	0.53	8,362,842,726.00	3.05
Aceh Tengah	2021	15.26	0.53	8,480,343,451.00	2.61
Aceh Tengah	2022	14.50	0.52	502,626,137.00	4.44
Aceh Tengah	2023	14.38	0.53	2,422,351,081.00	4.42
Aceh Tengah	2024	14.27	0.54	11,708,114,747.00	4.21
Aceh Barat	2020	18.34	0.50	10,780,106,597.00	7.30
Aceh Barat	2021	18.81	0.50	11,503,451,750.00	7.09
Aceh Barat	2022	17.93	0.52	8,746,324,448.00	6.09
Aceh Barat	2023	17.86	0.48	4,500,000.00	6.07
Aceh Barat	2024	17.60	0.53	3,243,315,086.50	5.58
Aceh Besar	2020	13.84	0.47	14,881,038,402.00	7.62
Aceh Besar	2021	14.05	0.47	15,879,556,079.00	7.70
Aceh Besar	2022	13.38	0.51	1,966,200,000.00	8.28
Aceh Besar	2023	13.38	0.50	10,794,686,734.00	8.17
Aceh Besar	2024	13.21	0.51	10,204,445,056.00	7.93
Pidie	2020	19.23	0.43	548,028,442.00	6.45
Pidie	2021	19.59	0.43	584,801,150.00	7.28
Pidie	2022	18.79	0.44	6,300,000,000.00	5.94
Pidie	2023	18.78	0.44		5.92
Pidie	2024	18.59	0.49	628,000,000.00	5.74
Bireuen	2020	13.06	0.49	7,193,467,932.00	4.12
Bireuen	2021	13.25	0.50	4,645,950,000.00	4.32
Bireuen	2022	12.51	0.52	3,585,750,905.00	4.20
Bireuen	2023	12.12	0.53	5,175,778,848.00	4.14
Bireuen	2024	12.10	0.53	6,240,510,435.00	3.93
Aceh Utara	2020	17.02	0.44	15,125,747,960.00	8.56
Aceh Utara	2021	17.43	0.46	16,140,685,648.00	8.31
Aceh Utara	2022	16.86	0.42	2,708,250,050.00	7.08
Aceh Utara	2023	16.64	0.48	23,571,039,900.00	7.07
Aceh Utara	2024	16.11	0.48	5,911,885,738.00	6.88
Aceh Barat Daya	2020	15.93	0.40	7,804,858,233.00	3.93

Aceh Barat Daya	2021	16.34	0.46	8,328,564,220.00	4.04
Aceh Barat Daya	2022	15.44	0.45		4.12
Aceh Barat Daya	2023	15.43	0.46	1,080,500,000.00	4.08
Aceh Barat Daya	2024	15.32	0.49	391,000,000.00	3.83
Gayo Lues	2020	19.32	0.45	4,700,000,000.00	2.01
Gayo Lues	2021	19.64	0.45	5,015,370,000.00	1.84
Gayo Lues	2022	18.87	0.60		2.70
Gayo Lues	2023	18.82	0.45	841,380,000.00	2.65
Gayo Lues	2024	18.30	0.47	600,000,000.00	2.40
Aceh Tami-ang	2020	13.08	0.48	8,175,450,000.00	7.97
Aceh Tami-ang	2021	13.34	0.51	8,724,022,695.00	5.87
Aceh Tami-ang	2022	12.61	0.58	4,112,500,000.00	7.38
Aceh Tami-ang	2023	12.51	0.60		7.21
Aceh Tami-ang	2024	12.17	0.57	6,279,436,587.00	6.95
Nagan Raya	2020	17.70	0.45	5,535,739,000.00	5.11
Nagan Raya	2021	18.23	0.46	5,907,187,087.00	4.99
Nagan Raya	2022	17.38	0.52	3,567,800,000.00	5.84
Nagan Raya	2023	17.25	0.44	3,665,285,000.00	5.74
Nagan Raya	2024	16.94	0.50	2,704,173,795.00	5.22
Aceh Jaya	2020	12.87	0.46	3,510,275,250.00	4.08
Aceh Jaya	2021	13.23	0.48	5,745,814,719.00	3.47
Aceh Jaya	2022	12.51	0.64	4,917,883,579.50	3.12
Aceh Jaya	2023	12.42	0.48	4,089,952,440.00	2.88
Aceh Jaya	2024	12.25	0.49	4,521,556,040.00	2.75
Bener Meriah	2020	18.89	0.45	8,972,539,990.00	1.35
Bener Meriah	2021	19.16	0.50	9,574,597,423.00	1.24
Bener Meriah	2022	18.39	0.50	1,199,989,832.00	2.61
Bener Meriah	2023	18.31	0.50	7,899,956,656.00	2.45
Bener Meriah	2024	18.18	0.51	8,445,767,242.00	2.20

Pidie Jaya	2020	19.19	0.44	2,505,606,367.00	6.58
Pidie Jaya	2021	19.55	0.46	2,673,732,554.00	3.57
Pidie Jaya	2022	18.45	0.51	1,339,366,277.00	4.40
Pidie Jaya	2023	18.40	0.48	5,000,000.00	4.34
Pidie Jaya	2024	18.28	0.52	918,664,513.00	3.82
Banda Aceh	2020	6.90	0.73	15,047,998,328.00	9.54
Banda Aceh	2021	7.61	0.77	16,057,719,016.00	8.94
Banda Aceh	2022	7.13	0.80	7,760,812,172.00	8.62
Banda Aceh	2023	7.04	0.96	17,201,428,044.00	8.03
Banda Aceh	2024	6.95	0.95	6,254,150,000.00	7.55
Sabang	2020	14.94	0.52	3,196,996,000.00	4.81
Sabang	2021	15.32	0.53	2,711,838,940.00	3.56
Sabang	2022	14.66	0.55	1,154,020,000.00	4.01
Sabang	2023	14.59	0.62	3,130,224,372.00	3.92
Sabang	2024	14.58	0.63	731,026,274.00	2.95
Langsa	2020	10.44	0.60	2,700,000,000.00	9.75
Langsa	2021	10.96	0.64	2,881,170,000.00	7.21
Langsa	2022	10.62	0.66		7.85
Langsa	2023	10.53	0.68	2,342,635,000.00	7.73
Langsa	2024	10.33	0.67	268,203,486.00	7.34
Lhokseumawe	2020	10.80	0.67	13,827,210,235.00	11.99
Lhokseumawe	2021	11.16	0.67	14,755,016,042.00	11.16
Lhokseumawe	2022	10.84	0.69	2,025,000,000.00	9.15
Lhokseumawe	2023	10.73	0.67	4,178,057,500.00	8.78
Lhokseumawe	2024	10.44	0.67	5,582,008,119.00	8.47
Subulussalam	2020	17.60	0.48	3,819,800,000.00	6.93
Subulussalam	2021	17.65	0.50	4,076,108,580.00	6.26
Subulussalam	2022	16.94	0.69		5.75
Subulussalam	2023	16.41	0.61	326,100,000.00	5.69
Subulussalam	2024	16.38	0.57	1,486,921,838.00	5.12

LAMPIRAN 2 STATISTIK DESKRIPTIF

Date:
08/13/26
Time: 00:39
Sample: 2020 2024

	Y	X1	LogX2	X3
Mean	15.08870	0.529043	4.258957	5.756696
Median	15.08000	0.500000	4.370000	5.750000
Maximum	20.36000	0.960000	4.890000	11.99000
Minimum	6.900000	0.400000	1.340000	1.240000
Std. Dev.	3.301643	0.097683	0.550619	2.140997
Skewness	-0.433535	1.988256	-2.710862	0.125649
Kurtosis	2.468901	8.068646	13.75389	2.674231
Jarque-Bera	4.953986	198.8724	694.9888	0.811112
Probability	0.083995	0.000000	0.000000	0.666606
Sum	1735.200	60.84000	489.7800	662.0200
Sum Sq. Dev.	1242.696	1.087795	34.56267	522.5609
Observa- tions	115	115	115	115

LAMPIRAN 3 *COMMON EFFECT MODEL (CEM)*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 08/13/26 Time: 00:35

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.85200	2.019797	14.77970	0.0000
X1	-19.90639	2.492016	-7.988066	0.0000
LogX2	-0.613087	0.414181	-1.480238	0.1416
X3	-0.281558	0.112336	-2.506400	0.0136
R-squared	0.484591	Mean dependent var	15.08870	
Adjusted R-squared	0.470661	S.D. dependent var	3.301643	
S.E. of regression	2.402133	Akaike info criterion	4.624754	
Sum squared resid	640.4967	Schwarz criterion	4.720230	
Log likelihood	-261.9234	Hannan-Quinn criter.	4.663507	
F-statistic	34.78766	Durbin-Watson stat	0.283866	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 4 *FIXED EFFECT MODEL (FEM)*

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/13/26 Time: 00:51
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.31392	0.765204	20.01287	0.0000
X1	-3.299496	0.951342	-3.468254	0.0008
LogX2	0.252464	0.084795	2.977365	0.0037
X3	0.077322	0.059722	1.294700	0.1988
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.988036	Mean dependent var	15.08870	
Adjusted R-squared	0.984675	S.D. dependent var	3.301643	
S.E. of regression	0.408721	Akaike info criterion	1.244311	
Sum squared resid	14.86771	Schwarz criterion	1.864904	
Log likelihood	-45.54787	Hannan-Quinn criter.	1.496206	
F-statistic	293.9975	Durbin-Watson stat	1.550676	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 5 *RANDOM EFFECT MODEL (REM)*

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/13/26 Time: 00:54
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.08165	0.889635	18.07668	0.0000
X1	-4.151513	0.931348	-4.457531	0.0000
X2	0.244341	0.084630	2.887166	0.0047
X3	0.028270	0.057653	0.490341	0.6249
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.339512	0.9704
Idiosyncratic random			0.408721	0.0296
Weighted Statistics				
R-squared	0.205716	Mean dependent var	1.175296	
Adjusted R-squared	0.184249	S.D. dependent var	0.488486	
S.E. of regression	0.441195	Sum squared resid	21.60647	
F-statistic	9.582853	Durbin-Watson stat	1.078876	
Prob(F-statistic)	0.000011			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.120230	Mean dependent var	15.08870	
Sum squared resid	1093.287	Durbin-Watson stat	0.021322	

LAMPIRAN 6 UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	170.231548 (22,89)		0.0000
Cross-section Chi-square	432.750990	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/13/26 Time: 01:03
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.85200	2.019797	14.77970	0.0000
X1	-19.90639	2.492016	-7.988066	0.0000
X2	-0.613087	0.414181	-1.480238	0.1416
X3	-0.281558	0.112336	-2.506400	0.0136
R-squared	0.484591	Mean dependent var	15.08870	
Adjusted R-squared	0.470661	S.D. dependent var	3.301643	
S.E. of regression	2.402133	Akaike info criterion	4.624754	
Sum squared resid	640.4967	Schwarz criterion	4.720230	
Log likelihood	-261.9234	Hannan-Quinn criter.	4.663507	
F-statistic	34.78766	Durbin-Watson stat	0.283866	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 7 UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Sta- tistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.339067	3	0.0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-3.299496	-4.151513	0.037643	0.0000
X2	0.252464	0.244341	0.000028	0.1238
X3	0.077322	0.028270	0.000243	0.0016

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/13/26 Time: 01:06
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.31392	0.765204	20.01287	0.0000
X1	-3.299496	0.951342	-3.468254	0.0008
X2	0.252464	0.084795	2.977365	0.0037
X3	0.077322	0.059722	1.294700	0.1988

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.988036	Mean dependent var	15.08870
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.984675	S.D. dependent var	3.301643
S.E. of regression	0.408721	Akaike info criterion	1.244311
Sum squared resid	14.86771	Schwarz criterion	1.864904
Log likelihood	-45.54787	Hannan-Quinn criter.	1.496206
F-statistic	293.9975	Durbin-Watson stat	1.550676
Prob(F-statistic)	0.000000		



LAMPIRAN 8 UJI ASUMSI KLASIK

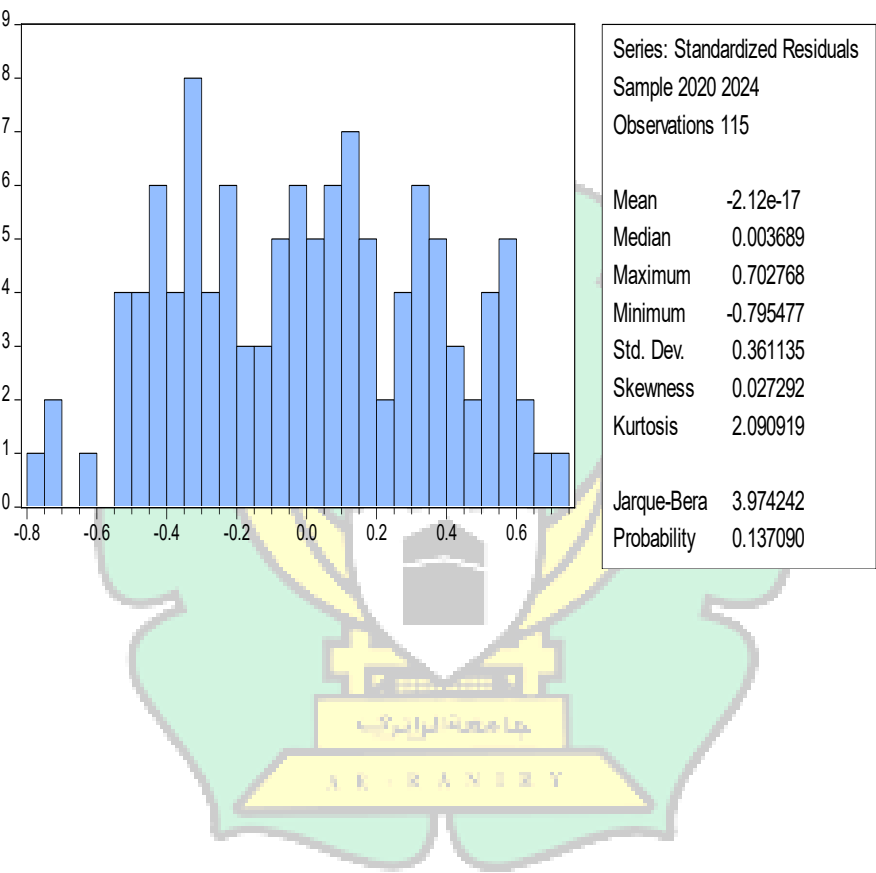
Uji Multikolinearitas

Variabel	X1	X2	X3
I-HDI (X ₁)	1	0.1544096	0.34975
LogZKT/Kapita (X ₂)	0.15441	1	0.00313
TPT (X ₃)	0.34975	0.0031282	1



LAMPIRAN 9 Uji ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas



LAMPIRAN 10 UJI ASUMSI KLASIK

Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	d_L	d_U	$d_L - 4$	$d_U - 4$
1.550676	1,6324	1,7452	2,3676	2,2548



LAMPIRAN 11 UJI ASUMSI KLASIK

Uji Heteroskedastisitas (*Absolute Residual*)

Dependent Variable: ABS(RESID01)

Method: Panel Least Squares

Date: 08/13/26 Time: 02:24

Sample: 2020 2024

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.554628	0.366390	1.513766	0.1336
X1	-0.482368	0.455515	-1.058950	0.2925
X2	0.073728	0.040601	1.815923	0.0727
X3	-0.053846	0.028596	-1.883019	0.0630
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.203113	Mean dependent var	0.303463	
Adjusted R-squared	-0.020732	S.D. dependent var	0.193703	
S.E. of regression	0.195701	Akaike info criterion	-0.228579	
Sum squared resid	3.408603	Schwarz criterion	0.392015	
Log likelihood	39.14328	Hannan-Quinn criter.	0.023317	
F-statistic	0.907383	Durbin-Watson stat	2.737754	
Prob(F-statistic)	0.594510			

